

**PENDAMPINGAN PEREMPUAN KOBAN KEKERASAN FISIK DI
LEMBAGA PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) PROVINSI LAMPUNG**



SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
mendapatkan Gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I)
Dalam ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Oleh:

Desi Ayu Pratiwi

1441040003

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
2016/2017**

**PENDAMPINGAN PEREMPUAN KOBAN KEKERASAN FISIK DI
LEMBAGA PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) PROVINSI LAMPUNG**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
mendapatkan Gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I)
Dalam ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Oleh:

Desi Ayu Pratiwi

1441040003

Pembimbing I : Dr. H.Rosidi M.A

Pembimbing II : Mubasit, S.Ag, MM

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
2016/2017**

ABSTRAK

PENDAMPINGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN FISIK DILEMBAGA PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) PROVINSI LAMPUNG

Oleh

DESI AYU PRATIWI

Pendampingan Perempuan merupakan tindakan sosial dimana perempuan korban kekerasan fisik mendapatkan bantuan dalam pemecahan masalah yang dimilikinya dengan tujuan agar perempuan dapat bangkit kembali rasa percaya diri agar mereka mempunyai keberanian dalam bertindak. Oleh karena itu pendampingan perempuan ini membantu seseorang agar lebih berani dalam mengambil keputusan. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Lampung merupakan salah satu lembaga Sosial Masyarakat yang membantu korban-korban kekerasan. Terutama pada perempuan dan anak. serta rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana Upaya Pendampingan yang dilakukan oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak, terhadap Para Korban Kekerasan Perempuan di Provinsi Lampung dengan penarikan kesimpulan data menggunakan cara induktif.

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif Kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang karakteristik individu dan situasi kelompok tertentu. Sumber data penelitian ini yaitu populasi yang berjumlah 25 orang sesuai dengan kriteria sampel 7 orang. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui interview sebagai metode utama, observasi dan dokumentasi sebagai metode pelengkap Analisa data menggunakan analisa kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian di peroleh bahwa Upaya yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Lampung yaitu Upaya Pencegahan, meliputi sosialisasi atau memperkenalkan adanya P2TP2A, bentuk-bentuk Kekerasan dan hukuman bagi pelaku. Upaya Penanganan, dilakukan dengan pemberian layanan (pelayanan medis, hukum, dan psikologi) dan memperluas jaringan kerjasama. Upaya Pemulihan, yaitu dengan pemberdayaan perempuan atau pelatihan-pelatihan agar klien atau korban kekerasan dapat mandiri dan dapat lebih percaya diri. Upaya yang dilakukan P2TP2A di Provinsi Lampung sejauh ini sudah berhasil.

Kata kunci: Pendampingan Korban Kekerasan



**DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
RADEN INTAN LAMPUNG**

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Alamat. Jl. Let.Kol H.Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 0721-703260

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “PENDAMPINGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN FISIK DI LEMBAGA PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLIDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) PROVINSI LAMPUNG ” yang di tulis oleh:

Nama : Desi Ayu Pratiwi
Npm : 1441040003
Jurusan : Bimbingan dan Konsling Islam

Telah diperiksa dan dikoreksi oleh pembimbing I dan pembimbing I, maka untuk itu, pembimbing I dan pembimbing II menyetujui untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam siding Munaqosah Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung 22 November 2017

Pembimbing I

Dr. H. Rosidi, M.A

NIP.1965030551994031005

pembimbing II

Mubasit, S.Ag. MM

NIP.197311141998031002

Mengetahui

Ketua Jurusan Bimbingan dan Konsling Islam

Hj. Rini Setiawati, M. Sos.I

NIP.197209211998032002



**DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Alamat. Jl. Let.Kol H.Endro Suratmin Sukaramel Bandar Lampung 35131 0721-703260

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "PENDAMPINGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN FISIK DI LEMBAGA PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLIDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) PROVINSI LAMPUNG" disusun oleh Nama: Desi Ayu Pratiwi NPM. 1441040003, Jurusan Bimbingan dan Konsling Islam, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi pada hari/tanggal: Senin, 12 Februari 2018

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Hj. Rini Setiawati, M.Sos,I

(.....)

Sekretaris : Nasiruddin S.Sos

(.....)

Penguji I : Dr. Fitriyanti, M.A

(.....)

Penguji II : Dr. H. Rosidi, M.A

(.....)

Mengetahui



Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.SI.
NIP. 196104091990031002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا سِحْلٌ لَّكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: “Hai Orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya , terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. “ (QS. an-Nisa [4]:19)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur Kepada Allah SWT, skripsi sederhana ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga

kepada :

1. Kedua Orang tua ku, Ayahanda Pikron dan Ibunda Sunayu tercinta yang senantiasa memberikan do'a, pengorbanan, kasih sayang, semangat, motivasi serta nasihat-nasihat yang baik kepada ku sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan penelitian ini.
2. Adik ku Yulinda sari, Ayu Nui, ayuk destri, cebuk Dika dan keponakan ku Yola yolanda, Anggi saputra, Diki Saputra.
3. Untuk Kelima sahabat ku Eka Purnama Sari, Amalia Jannati, Emi Agustini, Lussy Monica dan Erne Susan Anggraini atas kasih sayang, pengertian, dan semangat yang diberikan semoga persahabatan ini akan terus terjalin hingga rambut ini memutih dan Alwina Putri Dwigita, Erma Octaria, Lidya Ramadhani, Wulan Atika Sari semoga kesuksesan menghampiri kita.
4. Teman seperjuangan BKI Ida Efriyana, Anita Febriyani, Sella Riyanti, Endang Farida, Fahri Humaedi, Agus Riyanto, Bella Bahren, Aspriawan Bayu Aji, Devi dan sahabat-sahabat rekan seperjuangan yang tak bisa kusebutkan satu persatu, terimakasih telah mengisi indahnyanya pertemanan dikehidupan ku.

5. Seseorang telah setia mendampingi dan yang senantiasa memberikan dorongan, kasih dan sayangnya serta mendo'akan ku agar cepat dalam menyelesaikan studiku Sukri.
6. Untuk Teman-teman KKN-ku yang selalu memberikan semangat dan do'anya, Mar'ah Rizkiyana, Arsyilia Indri, Vera Ayu Puspita, Singgih Gunawan, Rizki Prabowo, Samanah, Edi Rofianto.
7. Untuk Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah dibanggakan.



RIWAYAT HIDUP

Penulis di anugerahi nama oleh ayahanda dan ibunda dengan nama Desi Ayu Pratiwi. Dilahirkan pada 19 Desember 1996 di Kota Bumi. Anak Pertama dari Dua Bersaudara buah perkawinan pasangan Bapak Pikron dan Ibu Sunayu.

Riwayat pendidikan penulis yang telah diselesaikan adalah:

1. Pendidikan di SDN 1 Rantau Temiang 2008
2. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Banjit Way Kanan Lampung Utara, tamat pada tahun 2011
3. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan di SMAN 1 Bukit Kemuning Lampung Utara yang selesai pada tahun 2014

Dengan mengucap alhamdulillah dan puji syukur kepada Allah SWT serta berkat dorongan dari ayahanda, ibunda dan keluarga, akhirnya penulis mempunyai kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan perguruan tinggi pada UIN Raden Intan Lampung dan mengambil program studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi pada tahun 2015.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai suatu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program studi Bimbingan Konseling Islam (BKI). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Teladan terbaik dalam segala urusan, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut sunnahnya..Aamiin

Adapun judul Skripsi ini adalah : **“PENDAMPINGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN FISIK DILEMBAGA PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) PROVINSI LAMPUNG”**. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, segala saran dan kritik dari pembaca guna penyempurnaan Skripsi ini sangat penulis harapkan .

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik yang secara langsung membimbing penulisan Skripsi ini maupun secara tidak langsung. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

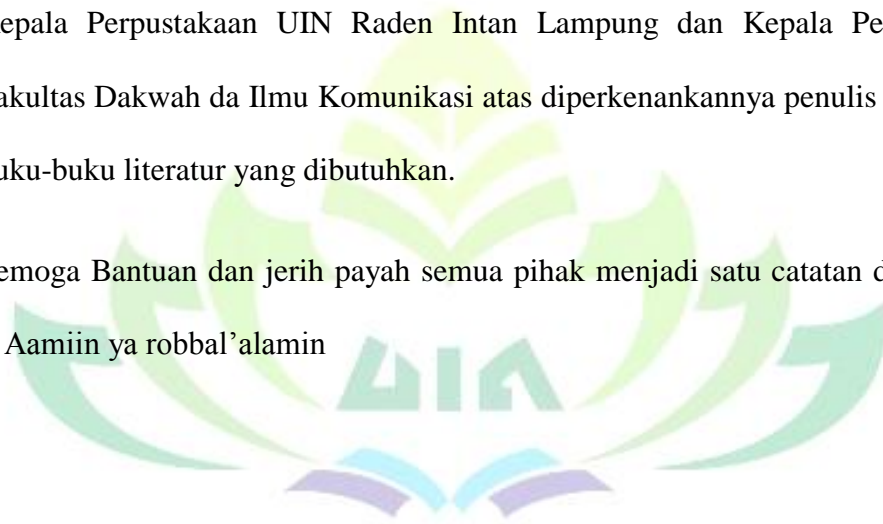
1. Bapak Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M. Si selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK) UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Rini Setiawati M.Sos.I sebagai ketua Jurusan BKI yang telah memberikan masukan dan arahan .

3. Bapak Mubasit, S. Ag, MM selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan Konseling Islam.

Bapak Dr. H. Rosidi M.A selaku Pembimbing I dan Bapak Mubasit, S. Ag,MM selaku Pembimbing II atas petunjuk dan saran beliau yang dengan penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan kepada penulis.

4. Bapak/Ibu Dosen yang telah membekali penulis, dan para Staf karyawan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah memberikan pelayanan akademik dalam pelaksanaan perkuliahan.
5. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan Kepala Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi atas diperkenalkannya penulis meminjam buku-buku literatur yang dibutuhkan.

Semoga Bantuan dan jerih payah semua pihak menjadi satu catatan disisi Allah SWT, Aamiin ya robbal'alamin



Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, karena tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang sempurna. Begitu juga dengan penulis hanya manusia biasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran bagi para pembacanya yang sifatnya membangun demi kebaikan skripsi yang akan mendatang dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan khususnya bagi penulis .
Aamiin yarobal'alam.

Bandar Lampung, Oktober 2017

Penulis

Desi Ayu Pratiwi

1441040003



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.	i
ABSTRAK.	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP..	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sumber Data Penelitian....	13
I. Metode Pengumpulan Data.....	15
J. Analisis Data.....	17
K. Penelitian Terdahulu....	18

BAB II PENDAMPINGAN PEREMPUAN DAN KORBAN KEKERASAN

A. Pendampingan.....	22
1. Pengertian Pendampingan.....	22
2. Peranan Pendamping	23

3. Tugas dan Tanggung Jawab Pendamping	25
B. Kekerasan Fisik Pada Perempuan	26
1. Pengertian Kekerasan.....	26
2. Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan	27
3. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga	29
4. Prinsip-PrinsipKonvensi Perempuan.	32
5. Hak Perempuan Di Muka Umum.....	33
6. Pengertian Korban..	34

BAB III PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DALAM UPAYA USAHA PENDAMPINGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN FISIK

A. Gambaran Umum Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak	42
1. Sejarah Berdirinya.....	42
2. Visi dan Misi P2TP2A	42
3. Tujuan Program P2TP2A	43
4. Struktur Organisasi P2TP2A.....	45
B. Program Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan di P2TP2A	48
1. Program Pencegahan	48
a. Sosialisasi.....	49
b. Penyuluhan.....	49
2. Upaya Penanganan.....	50
a. Pemberian Layanan	50
3. Upaya Pemulihan.....	51
a. Pemberdayaan.....	51
b. Rehabilitasi Sosial	52
C. Usaha Pendampingan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	53

BAB IV PENDAMPINGAN PEREMPUAN KEKERASAN FISIK

A. Upaya Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Fisik Di P2TP2A Provinsi Lampung	69
B. Hasil Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan fisik pada Perempuan P2TP2A	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Penanganan Kasus Tahun 2017 P2TP2A Provinsi Lampung	46
Tabel 1.2 Data Pekerja Sosial/Karyawan P2TP2A Provinsi Lampung	47
Tabel 1.3 Kasus yang di tangani P2TP2A 2013-2017.	48
Tabel 1.4 Proses Pelayanan P2TP2A Provinsi Lampung	63



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Judul Skripsi dan penunjukkan Pembimbing dari Rektorat UIN Raden Intan Lampung
2. Surat Rekomendasi Penelitian dari Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung
3. Kartu Konsultasi
4. Kartu Hadir Munaqasah
5. Surat Keterangan Telah melaksanakan Penelitian dari Lembaga P2TP2A Provinsi Lampung
6. Daftar Nama Sampel
7. Pedoman Interview
8. Pedoman Observasi
9. Pedoman Dokumentasi
10. Foto Kegiatan P2TP2A Way Halim Kota Bandar Lampung



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Agar tidak ada kesalahan dalam memahami penegasan judul penelitian penulis menegaskan beberapa istilah dalam judul tersebut, adapun judul proposal ini adalah **“PENDAMPINGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN FISIK DILEMBAGA PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) PROVINSI LAMPUNG.”**

Pendampingan adalah proses pemberian konsultasi yang mencakup informasi hukum dan hak-hak korban, mendampingi korban di setiap pemeriksaan dalam proses hukum, melakukan koordinasi yang terpadu dengan sesama penegak hukum ataupun pihak pemberi layanan lainnya berdasarkan kebutuhan korban.¹

Perempuan korban kekerasan fisik, Jerom Skolnick mengatakan bahwa tindak kekerasan merupakan *“an ambiguous term whose meaning is established through political process”* yang makna nya kekerasan terhadap perempuan tidak mendapatkan perhatian yang memadai dalam proses hukum politikal. apapun, bila dilihat dari bentuknya, tindak kekerasan mempunyai dampak yang sangat

¹ Nursyahid, *Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan*, (Jakarta:BP Panca Usaha, 2010), hlm 118

traumatis bagi perempuan, baik dikaitkan maupun tidak dengan kodrat perempuan sendiri²

Berdasarkan Pendapat diatas maka yang dimaksud dengan Kekerasan fisik adalah bentuk tindakan yang dilakukan terhadap pihak lain, baik yang dilakukan oleh perorangan atau pun lebih dari satu orang yang dapat mengakibatkan penderitaan pada pihak lain. Kekerasan fisik yang terjadi antara lain: Tamparan, pemukulan, mendorong secara kasar, pelemparan benda keras, penyiksaan benda tajam, seperti: pisau, gunting, setrika, tindakan tersebut mengakibatkan rasa sakit dan penderitaan pada korban. adapun faktor penyebab dari kekerasan fisik adalah persoalan ekonomi, faktor cemburu dan perselingkuhan.

Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak dan Perempuan (P2TP2A), Adalah lembaga pemberdayaan perlindungan anak dan perempuan yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat Indonesia terutama pada perempuan korban kekerasan. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) bertujuan untuk melakukan pelayanan bagi tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dan berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan Gender. Dan merupakan rambu-rambu bagi penyelenggaraan pelayanan

² Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap* , (Jakarta: PT Alumni, 2000), hlm 80

bagi perempuan dan anak korban kekerasan, sehingga arah dan tujuan program dapat diketahui.³

Dari penjelasan istilah tentang judul yang penulis buat dalam penelitian di atas, maka yang dimaksud penelitian ini adalah studi yang dilakukan untuk mengkaji upaya yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Lampung terhadap perempuan korban kekerasan fisik. Serta memberikan pelayanan pendampingan psikologis pada korban kekerasan khususnya perempuan dan anak yang ada di Provinsi Lampung.

B. Alasan memilih judul

Alasan Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini di antaranya adalah:

1. Objektif

Pendampingan perempuan sangatlah penting dengan melihat banyaknya kekerasan di provinsi Lampung ini, karena masih banyak perempuan yang tidak berani atau percaya dalam bertindak dan dengan adanya pendampingan perempuan korban kekerasan fisik dapat membangkitkan rasa percaya diri korban itu sendiri.

³ Nursyahid, *Op, Cit* , hlm. 66

2. Subjektif

Mengingat adanya masalah yang dibahas sangat relevan dengan ilmu atau jurusan yang penulis tekuni di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Jurusan Bimbingan Konseling Islam, sehingga penulis merasa mampu mengkaji permasalahan ini, waktu dan biayapun masih bisa di jangkau selain itu, literatur dokumen lainnya yang mendukung dalam Penelitian ini.

C. Latar Belakang Masalah

Perempuan adalah anugerah dari Allah SWT yang wajib dilindungi dan diberikan kasih sayang. Tapi masih banyak dibelahan dunia perempuan yang mengalami korban kekerasan fisik. Perempuan makhluk yang Allah muliakan martabatnya dan perempuan adalah lemah-lemahnya hati dan Allah menciptakan agar laki-laki dapat menjaganya, sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasannya ialah dia menciptakan untuk mu isteri-isteri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada nya, dan dijadikannya diantara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(Q.S. Ar-Ruum [30]:21)

Ayat diatas sepatutnya dimaknai bahwa Allah menciptakan isteri-isteri untuk mu agar kamu merasa tentram dan memberikan kasih sayang kepada perempuan. Dan supaya kita mengarahkan diri pada keridhaan Allah SWT.

Adapun perempuan dianggap sebelah mata oleh mereka yang tidak bertanggung jawab, dianggap kaum yang lemah yang mudah ditindas kapan saja dan dimana saja, dengan demikian perempuan merasa kesulitan untuk meminta bantuan dikarenakan adanya ancaman yang akan membahayakan mereka. Dengan keadaan yang demikian membuat perempuan mengalami gangguan perasaan rasa takut yang berlebihan dan rasa kekhawatiran. Untuk membantu para perempuan Korban kekerasan fisik ini agar dapat terbebas dari siksaan fisik dan psikis yang mereka alami ini maka diperlukan adanya suatu lembaga perlindungan dalam menangani kasus kekerasan fisik itu sendiri, pelaku kekerasannya, dapat berasal dari berbagai latar belakang Usia, pendidikan, tingkat sosial, ekonomi, agama, dan suku bangsa, khusus untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga, perempuan korban kekerasan yang dapat teridentifikasi adalah mereka yang mencari pertolongan. Perempuan demikian tidak jarang tampil sebagai perempuan yang sangat pasif, dan terkesan sangat emosional atau sebaliknya terkesan sulit diajak berkomunikasi dan terpaku pada pemikiran-pemikirannya sendiri.⁴ Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Tindak kekerasan ini paling banyak dialami

⁴ Achi Sudiarti Luhulima, *Op, Cit*, hlm 30

perempuan yang melaporkan sampai 70%. Bentuk kekerasan fisik yang terjadi antara lain berupa pemukulan, tamparan, atau korban disundut rokok yang masih menyala.⁵

Tindak kekerasan terhadap perempuan seringkali dianggap suatu isu yang terbelakang atau bahkan dapat dikatakan tidak menarik. Padahal jika dilihat dari kenyataan yang selama ini terjadi, tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman terus menerus bagi perempuan di manapun di dunia. Hal ini merupakan akibat dari adanya pandangan di sebagian besar masyarakat yang menganggap kedudukan perempuan disebagian dunia yang tidk dianggap sejajar dengan laki-laki, terlebih lagi rasa takut kaum perempuan terhadap kejahatan (*fear of cream*) jauh lebih tinggi di bandingkan dengan apa yang dirasakan oleh kaum pria.⁶

Adapun kekerasan terhadap Perempuan di Provinsi Lampung sepanjang tahun 2017 terus mengalami peningkatan, terjadi 57 kasus diantaranya:⁷

1. Kekerasan Fisik berjumlah 10 Orang
2. Kekerasan Psikis berjumlah 9 Orang
3. Kekerasan seksual berjumlah 19 Orang
4. TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) Berjumlah 1 Orang
5. Penelantaran berjumlah 8 Orang

⁵ Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (Jakarta:Sinar Grafika,2011). hlm 38

⁶ Moerti Hadiati . *Op, Cit*. hlm 58

⁷ Dokumentasi P2TP2A Provinsi Lampung 20 Oktober 2017

6. Perceraian berjumlah 8 Orang

7. Hak Asuh berjumlah 2 Orang

Setelah ditelusuri penyebab Kekerasan Pada Perempuan terutama di dalam rumah tangga yaitu Masalah keuangan, Cemburu, masalah anak, masalah orang tua, masalah salah paham dan suami yang mau menang sendiri. Adapun perempuan yang mengalami korban kekerasan seksual oleh suami nya sendiri dan masih banyak kasus-kasus yang lain yang belum terungkap, banyak warga yang masih merasa malu, tidak peduli dengan masalah semacam itu, setiap perempuan mendapatkan kekerasan maka berhak mendapatkan perlindungan.⁸ Sebagaimana yang di sebutkan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 1 yang berbunyi. “perlindungan adalah segala upaya yang di tujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang di lakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.”⁹

Akan tetapi kekerasan terhadap perempuan kurang mendapat tanggapan dari masyarakat dan pakar penegak hukum karena beberapa alasan yaitu tindak kekerasan pada perempuan memiliki ruang lingkup sangat pribadi dan terjaganya privasi yang berkaitan dengan kesucian dan keharmonisan rumah tangga serta

⁸ Tri Apiani, Pekerja Sosial, P2TP2A Provinsi Lampung, *Wawancara*, Tanggal 25 Agustus 2017

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1. hlm 3

tindak kekerasan pada perempuan dianggap biasa oleh masyarakat umum dikarenakan masyarakat umum tidak ingin ikut dalam permasalahan pribadi.¹⁰

Adapun layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang ada di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) ini antara lain :mendampingi korban ditingkat penyelidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban agar dapat memaparkan kekerasan yang dialaminya secara objektif dan lengkap serta memberikan penguatan kepada korban secara psikologis maupun fisik.¹¹Dengan adanya bantuan Psikologis dari Pendamping Korban dapat mengambil keputusan sendiri apa yang akan dia lakukan serta akan mengurangi masalah yang dihadapi korban itu sendiri.

Adapun Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan:

1. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan di lingkungan masyarakat meliputi: Perdagangan perempuan, Pelecehan seksual di tempat kerja umum, Pelanggaran hak-hak reproduksi, Perkosaan, Pencabulan, Kebijakan atau Perda Diskriminatif.
2. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan di lingkungan rumah tangga meliputi: Kekerasan fisik, psikis dan seksual Kekerasan Dalam Rumah

¹⁰ Tri Apiani, Pekerja Sosial, P2TP2A provinsi Lampung, *Wawancara*, Tanggal 25 Agustus 2017.

¹¹ Aira Juliana, Pekerja Sosial, P2TP2A Provinsi Lampung, *Wawancara*, Tanggal 25 Agustus 2017

Tangga (KDRT), Kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, Ingkar janji atau kekerasan dalam pacaran, Pemaksaan aborsi oleh pasangan, kejahatan perkawinan atau poligami tanpa izin.¹²

Adapun beberapa kegiatan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2017 diantaranya penanganan kasus anak dan perempuan

Fenomena Kekerasan pada perempuan mulai terungkap setelah Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tahun 2004 diberlakukan, dimana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang sebelumnya masalah privasi menjadi masalah publik ditandai laporan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) semakin meningkat setiap tahunnya dan pelaku mendapat hukuman pidana walaupun saat ini kultur Indonesia masih didominasi laki-laki. Tindak Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah bersama. Oleh karena itu, masyarakat dan juga negara perlu disadarkan, didesak, dituntut dan diawasi untuk turut bertanggung jawab dalam memerangi kekerasan berdasarkan jenis kelamin ini.¹³

Dengan adanya Fenomena Kekerasan terhadap perempuan ini maka terbentuknya Lembaga–Lembaga yang Peduli dengan Anak dan perempuan sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan. Dan dengan adanya Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Anak dan Perempuan (P2TP2A) di Provinsi Lampung

¹² Fathul Djannah dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2003), hlm 31

¹³ Moerti Hadiati Soeroso, *Op.Cit*, hlm, 5

dapat membantu korban-korban kekerasan Anak dan Perempuan di masyarakat lampung itu sendiri. Untuk itu melihat betapa pentingnya Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Anak dan Perempuan (P2TP2A) Provinsi Lampung yang bergerak dalam membantu Pendampingan Korban kekerasan fisik. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui proses dari pendampingan korban kekerasan fisik di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Anak dan Perempuan (P2TP2A) Provinsi Lampung.

D. Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang Masalah di atas, maka masalah yang akan diteliti adalah “Bagaimana Upaya Pendampingan yang dilakukan oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak, terhadap Para Korban Kekerasan Perempuan di Provinsi Lampung?”

E. Tujuan penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

mengetahui upaya pendampingan yang dilakukan lembaga terhadap perempuan korban kekerasan fisik di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Provinsi Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Kegiatan penelitian ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk mengeksplorasi materi-materi yang didapatkan di bangku perkuliahan di Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Hasil penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan pengembangan baru mengenai perlindungan bagi anak dan perempuan melalui Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A).

2. Secara Praktis

Masyarakat Umum mengetahui adanya lembaga yang peduli terhadap kasus-kasus Perempuan, sekaligus memberikan advokasi dan Perlindungan kepada para korban yang membutuhkan bantuan untuk mendapatkan perlindungan dan hak-haknya secara wajar dan bagi lembaga di harapkan akan menjadi *feedback* (umpan balik), Bagi penyempurnaan agar organisasi menjadi lebih baik lagi.

Bagi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), untuk lebih baik lagi dalam memberikan Pelayanan kepada para Korban Kekerasan sekaligus mendapatkan Hak-hak mereka secara wajar.

G. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian, sangat diperlukan suatu metode yang tepat dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, disamping itu, dibutuhkan cara-cara yang lain, sehingga data yang terkumpul memenuhi syarat untuk diadakan pengolahan, dan dalam pengolahannya juga menemukan suatu proses yang sistematis dan ilmiah. Hal yang dimaksud adalah sebagai berikut

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Dilihat dari jenis penelitiannya ini termasuk kategori Lapangan (*Field Research*), karena data di peroleh dari data kehidupan di Masyarakat.¹⁴

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif yaitu dalam penelitian deskriptif menggambarkan tentang karakterisitik individu, situasi kelompok tertentu.¹⁵

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Secara termenologis penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip Lexy J. Moleong merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data

¹⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta:Gajah Mada University press, 1996) hlm 32

¹⁵ Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian*, (jakarta: Rajawali Pers,2010) hlm.11

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁶

H. Sumber data Penelitian

1. Populasi

Sebuah Penelitian sosial disebutkan bahwa unit analisis menunjukkan siapa yang mempunyai sifat karakteristik yang akan diteliti. Karakteristik yang dimaksud adalah variabel yang menjadi perhatian peneliti. Unit analisis penelitian umumnya adalah orang sebagai individu, kelompok, keluarga, desa, kota, dan lembaga.¹⁷

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 25 Orang.

2. Sampel

Sampel adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan dianggap dapat menggambarkan populasinya, penelitian pada sampel hanya merupakan pendekatan pada populasinya.¹⁸ Sebagian dari populasi yang diperoleh melalui proses sampling tertentu, tujuan sampel ialah untuk memperoleh keterangan mengenai objek penelitian dengan cara mengamati sebagian dari populasi saja.

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm 4

¹⁷ Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm.102.

¹⁸ Safari Imam Ashari, *Suatu Petunjuk Praktis Metodelogi Penelitian*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), hlm 75

Adapun tehnik yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik Non Random Sampling, artinya tidak semua individu didalam populasi diberikan hak yang sama untuk dijadikan anggota sampel.¹⁹

Dalam jenis sampel penulis menggunakan purposive sampling yaitu dalam memilih sekelompok subyek yang didasari atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diapandang mempunyai hubungan yang erat dengan ciri-ciri dan sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.²⁰

Berdasarkan pendapat diatas kriteria untuk menjadi sampel adalah:

- a. Yang sudah terlibat langsung dalam proses pendampingan minimal 3 tahun
- b. Sebagai karyawan tetap di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
- c. Psikolog yang sudah mempunyai pengalaman dan banyak menangani masalah-masalah klien korban kekerasan

Berdasarkan kriteria tersebut, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 7 orang, yang terdiri dari kepala lembaga P2TP2A, pekerja sosial atau tim pendamping 3 orang, psikolog 2 orang, kasi pelayanan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan 1 orang.

¹⁹ Suharsimi Arikunt, *Op. Cit.* 116

²⁰ Hadari Nawawi. *Op, Cit.* hlm 113

I. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data sebagai bahan penelitian maka di gunakan data yang dapat dipercaya kebenarannya, pada penelitian ini penelitian ini menggunakan metode:

1. Metode Wawancara (*Interview*)

Interview atau wawancara merupakan percakapan yang diarahkan pada masalah tertentu. Kegiatan ini merupakan proses tanya jawab secara lisan dari dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik (langsung). Oleh karena itu kualitas hasil wawancara ditentukan oleh pewawancara, responden, pertanyaan dan situasi wawancara.²¹

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis interview (wawancara) bebas terpimpin yaitu pewawancara secara bebas bertanya apa saja dan harus menggunakan acuan pertanyaan lengkap dan terperinci agar data-data yang diperoleh sesuai dengan harapan.

Metode ini digunakan karena penulis mendapatkan data yang dibutuhkan akan dapat diperoleh secara langsung sehingga kebenarannya tidak akan diragukan lagi. Penulis mempersiapkan pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti dan juga yang di interview tidak merasa lelah diambil datanya.

²¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, (Bandung: Mundiur Maju, 1996), hlm 32

Metode ini digunakan sebagai metode utama dalam pengumpulan data dan teknik interview ini peneliti tujukan kepada Pekerja Sosial dan Konselor yang paham tentang Pendampingan perempuan kekerasan fisik di P2TP2A Provinsi Lampung, sedangkan data yang diperoleh melalui interview ini meliputi upaya-upaya yang dilakukan oleh lembaga P2TP2A di Provinsi Lampung. Sedangkan metode observasi dan metode dokumentasi hanya sebagai pelengkap.

2. Observasi (pengamatan)

Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti.²²

Teknik observasi non partisipatif ini dilaksanakan dengan cara peneliti berada dilokasi penelitian, hanya pada saat melaksanakan penelitian tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip dan buku-buku, surat kabar majalah dan

²² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 98

sebagainya.²³ Dalam pemanfaatan dokumen sebagai data dalam penelitian ini, bahwasanya tidak seluruh isi dokumen dimasukkan secara tertulis, melainkan diambil pokok-pokok isinya yang diperlukan, sedangkan yang lainnya dijadikan sebagai pendukung analisa. Adapun data yang digali melalui dokumentasi meliputi sejarah, program dan struktur kepengurusan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

J. Metode Analisis Data

Dalam pengelolaan analisis data ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode berpikir induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit dari fakta-fakta itu ditarik generalisasi bersifat umum, dan metode-metode bersifat induktif yaitu pengambilan kesimpulan dari suatu masalah berdasarkan pada hal-hal atas kejadian-kejadian yang umum pada suatu kesimpulan yang khusus.
- b. Metode berpikir kualitatif yakni metode yang berakar pada latar ilmiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, mengadakan analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitian pada usaha menemukan teori dari dasar dan lebih memerlukan proses dari

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1998), hlm.11

pada hasil.²⁴ Dalam penelitian kualitatif, analisis dilakukan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data model Miles dan Huberman:

- 1). Reduksi data, yaitu merangkum, mengkategorikan memilih-milih hal yang dianggap penting dan pokok. Data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran jelas dan mempermudah dalam pengumpulan data selanjutnya.
- 2). Penyajian data, yaitu dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori. Penyajian data memudahkan untuk memahami yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang telah dipahami.
- 3) Verifikasi, yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini menjawab rumusan masalah yang dirumuskan dari awal.²⁵

K. Penelitian Terdahulu

Dalam Penelitian ini terdapat beberapa penelitian dengan tema serupa yang telah peneliti baca sebagai bahan perbandingan untuk mengetahui perbedaan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian yang ada

²⁴ Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2002) hlm

²⁵ Hamid Patimilia, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:CV.Alfabeta,2013), hlm 100-101

sebelumnya. Adapun penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya antara lain:

Pertama, Penelitian Intalia Ari Tonang mahasiswa UIN Yogyakarta dengan judul skripsinya Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Keluarga Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. penyelenggaraan kerjasama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga harus diarahkan pada pulihnya kondisi korban semula baik secara fisik maupun psikis dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan pelayanan harus dilaksanakan semaksimal mungkin setelah adanya pelayanan dan pengaduan pemulihan korban.
2. kekerasan dalam rumah tangga terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana penelantaran terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangga harus dikenakan hukuman sesuai dengan hukuman yang berlaku yang diatur dalam UU.NO 23 tahun 2004.²⁶

Kedua, penelitian Marisa Kurnianingsih Mahasiswa UIN Yogyakarta dengan judul skripsinya Kasus kekerasan dalam rumah tangga diluar pengadilan. Penelitian ini dibatasi pada penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga diluar pengadilan dengan korban perempuan yang

²⁶ Eka Bintara (On-Line) Tersedia di Diglib.uin-suka.ac.id. diakses. (Rabu 1 Maret 2017)

berkedudukan sebagai istri, beberapa poin yang dirumuskan dalam skripsi ini adalah:

- a. Karakteristik kasus dalam rumah tangga diluar pengadilan
- b. Karakteristik pada pihak kekerasan rumah tangga dalam kasus yang diselesaikan diluar pengadilan
- c. Alasan para pihak yang menggunakan penyelesaian diluar pengadilan untuk kasus dalam rumah tangga
- d. Bentuk dan proses dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga diluar pengadilan yang digunakan oleh para pihak.
- e. Faktor-faktor yang menghambat keberhasilan dan penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga diluar pengadilan.

Ketiga, penelitian Fera Lia Maya Bkti Mahasiswa UIN Yogyakarta dengan judul skripsinya Persepsi Istri Terhadap Kekerasan Pada Perempuan.

Fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan persepsi kekerasan terhadap perempuan, faktor yang menjadi penyebab kekerasan sesuai dengan persepsi korban kekerasan (perempuan). Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa persepsi perempuan terhadap kekerasan dianggap sebagai tindakan yang negatif, hal ini sesuai dengan pengalaman perempuan sebagai korban kekerasan.²⁷ Bagi perempuan kekerasan yang dialami merupakan pengalaman yang buruk dalam

²⁷Eka Bintari (on-line), Tersedia di Diglib uin-suka.ac.id, diakses, (1 Maret 2017)

kehidupannya. Sehingga mereka berharap tidak mengalami kekerasan di kehidupan mendatang. Akar permasalahan tentang persepsi perempuan terhadap kekerasan didorong oleh kondisi ekonomi, pendidikan, campur tangan pihak ketiga dan perselingkuhan. Penelitian persepsi perempuan terhadap korban kekerasan pada ketiga subjek yang mengalami kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual didominasi oleh kondisi ekonomi.

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas bahwa penelitian yang ingin diteliti penulis, memiliki perbedaan yakni, substansi masalah yang berbeda dari penelitian yang sudah ada. Fokus penelitian ini kepada upaya pendamping perempuan korban kekerasan di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Lampung. sebagaimana upaya tersebut antara lain Upaya Pencegahan, meliputi sosialisasi atau memperkenalkan adanya Pusat Pelayanan Terpadu Anak dan Perempuan (P2TP2A), bentuk-bentuk Kekerasan dan hukuman bagi pelaku. Upaya Penanganan, dilakukan dengan pemberian layanan (pelayanan medis, hukum, dan psikologi) dan memperluas jaringan kerjasama. Upaya Pemulihan, yaitu dengan pemberdayaan perempuan atau pelatihan-pelatihan

BAB II

PENDAMPINGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN FISIK

A. Pendampingan

a. Pengertian Pendampingan

Kata pendampingan berasal dari kata “damping: yang artinya dekat, karib, rapat. Mendampingi artinya menemani: menyertai dekat-dekat. Mendampingi berarti mendekatkan atau menaruh berdampingan. Sedangkan pendampingan adalah proses, cara perbuatan mendampingi atau mendampingi.²⁸

Pendampingan adalah suatu proses hubungan sosial antara pendamping dengan korban dalam bentuk pemberian kemudahan untuk memecahkan masalah. Orang yang melakukan pendampingan biasanya disebut dengan pendamping. Sedangkan yang memperoleh pendampingan disebut klien. Pendamping dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok masyarakat atau lembaga yang memiliki kemampuan fungsional dan profesional yang di berikan kewenangan untuk melakukan pendampingan.²⁹

Sedangkan menurut Nursyahid mendefinisikan pendampingan. Pendampingan adalah proses pemberian konsultasi yang mencakup informasi hukum dan hak-hak korban, mendampingi korban di setiap pemeriksaan dalam proses hukum, melakukan koordinasi yang terpadu dengan sesama

²⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 243

²⁹ “:PengertianPendamping”(online) Tersedia di www.bintas.web.id/2010/12/pengertianpendamping.html?m=1, diakses, (1 Mei 2017)

penegak hukum ataupun pihak pemberi layanan lainnya berdasarkan kebutuhan korban.³⁰

Pendampingan mempunyai peran dalam membantu menyelesaikan atau meningkatkan kemampuan individu maupun kelompok yang didampingi dalam rangka mencari alternatif penyelesaian masalah yang dihadapinya, kemampuan tersebut pada dasarnya sangat di pengaruhi oleh keberdayaan pada dirinya sendiri. oleh karena itu untuk melahirkan keberdayaan pada dirinya dibutuhkan kegiatan pemberdayaan di setiap pendampingan. Hal ini dipertegas oleh Edi Suharto yang mengatakan bahwa pendampingan merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.³¹

Agar pelaksanaan pendampingan mencapai keberhasilan dengan tujuan dan sasaran, maka seorang pendamping harus memiliki berbagai keterampilan guna kelancaran proses pendamping seperti:

- a. Keterampilan untuk membangun hubungan kontak awal seseorang untuk melibatkan korban, keluarga dan masyarakat dalam situasi membantu korban.
- b. Keterampilan berkomunikasi baik yang bersifat verbal maupun nonverbal seperti keterampilan dalam pengenalan, melakukan wawancara, mendengarkan, menggunakan bahasa tubuh dan sebagainya.
- c. Keterampilan melakukan intervensi seperti memberikan bimbingan motivasi, bimbingan rohani dan sebagainya.

³⁰ Nursyahid, *Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan*, (Jakarta:BP Panca Usaha, 2010), hlm 118

³¹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, (Bandung:Refika Persada, 2005), hlm. 93

Adapun tujuan dari pendampingan psikososial bagi perempuan korban kekerasan Yaitu membuat korban mampu memahami persoalan yang dialami secara lebih multidimensial serta membantu korban mencegah dan menghadapi masalah dimasa mendatang dan menemukan potensi-potensi korban itu sendiri.

Sementara itu, salah satu trobosan hukum lain dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah diaturnya prihal peran dari relawan pendamping. Menurut Undang-Undang ini, ada beberapa hal yang menjadi tugas dari relawan pendamping:

- a. Meninformasikan mengenai hak korban untuk mendapatkan seorang atau lebih pendamping.
- b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban agar dapat memaparkan kekerasan yang dialaminay secara objektif dan lengkap.
- c. Mendengarkan segala penuturan korban.
- d. Memberikan penguatan kepada korban secara psikologis maupun fisik.³²

b. Peranan Pendamping Perempuan Korban Kekerasan

Berikut peranan pendamping menurut Direktorat Bantuan dan jaminan Sosial:

³² Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta:Sinar Grafika,2011), hlm. 71

1. Fasilitator, yaitu peranan untuk membantu korban tindak kekerasan sehingga korban dapat berkembang dan memperoleh akses terhadap berbagai sumber yang dapat mempercepat keberhasilan usahanya.
2. Perantara, yaitu peranan sebagai media yang dapat menghubungkan antara korban dengan sistem sumber sehingga korban memperoleh akses yang baik akses terhadap sumber-sumber tersebut.
3. Pendidik, yaitu peranan sebagai pembimbing yang peningkatan kemampuan dan keterampilan korban dalam rangka pengembangan usaha yang dilakukan dan dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapinya.
4. Penolong, yaitu peranan sebagai orang yang memeberikan bantuan pertolongan kepada korban dalam rangka menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi.
5. Penghubung, yaitu peranan sebagi jembatan yang dapat menyambungkan antara kepentingan korban dengan berbagai sistem yang dapat dimanfaatkan korban dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.

Berjalan dari peran-peran yang dimiliki oleh pendamping akan menentukan keberhasilan proses pendampingan. Sebagaimana menurut Primahendra, bahwa pendampingan adalah kegiatan pemberdayaan

masyarakat dengan mendapatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator dan dinamisator.³³

c. Tugas dan Tanggung Jawab Pendamping

Dalam melaksanakan tugasnya, pendamping harus berpatokan pada prinsip-prinsip pekerjaan sosial sebagai berikut:

1. Penerimaan, yaitu sebagai pendamping harus bisa menerima korban apa adanya tanpa memandang latar belakangnya.
2. Individualisasi, yaitu harus memahami bahwa korban merupakan pribadi yang tidak sama dengan korban lainnya.
3. Bersikap tidak menghakimi, pendamping harus memahami perilaku-prilaku korban tanpa menghakimi atau melakukan penilaian secara sepihak.
4. Kerahasiaan, yaitu pendamping harus bisa menjaga korban yang bersifat pribadi kepada orang lain.
5. Rasional, yaitu pendamping harus memberikan pertimbangan yang bersifat pribadi kepada orang lain.
6. Empati, yaitu pendamping harus mampu menunjukkan sikap memahami perasaan korban.
7. Kesungguhan dan ketulusan, dalam memberikan pelayanan harus dilandasi sikap yang tulus.
8. Mawas diri, pendamping harus menyadari akan potensi dan keterbatasan dirinya.³⁴

d. Prinsip Dasar Pendampingan

Terdapat beberapa prinsip dasar dalam pendampingan terhadap korban:

1. Perempuan korban kekerasan janganlah dipersalahkan atas kejadian yang menimpanya.
2. Pelaku kekerasan adalah orang yang seharusnya bertanggung jawab atas tindakan kekerasan yang dilakukannya.

³³ R.Primahendra, *Pedoman Pendampingan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta:2002), hlm 6

³⁴ *Ibid.* hlm 67

3. Masyarakat dan berbagai institusi pemerintah dan non pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab secara tidak langsung atas masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Solusi atas masalah kekerasan terletak pada kombinasi antara aksi pribadidan sosial, serta di dukung oleh sistem hukum yang memadai.³⁵

B. Kekerasan Fisik Pada Perempuan

1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain). Yang menyebabkan atau yang dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu tindakan menyakiti seseorang.³⁶ Kekerasan fisik terhadap perempuan dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, jambakan, dan lain-lain. Kadang-kadang kekerasan fisik di ikuti dengan kekerasan seksual maupun berupa persetubuhan paksa. Pada pemeriksaan atas korban akibat kekerasan fisik, yang dinilai sebagai akibat penganiyaan adalah bila didapati luka bukan karena kecelakaan pada perempuan, jelas itu dapat diakibatkan oleh suatu episode kekerasan yang tunggal atau berulang-ulang, dari yang ringan hingga yang fatal.³⁷ Pada tahap munculnya ketegangan yang mungkin disebabkan percekcoakan terus menerus, atau tidak saling memerhatikan, atau kadang-kadang keduanya disertai dengan kekerasan kecil, namun pada tahap kedua kekerasan ini mulai muncul

³⁵ Elli Nur Hayati, *Panduan Pendampingan Korban Kekerasan*, (Yogyakarta: Rifka Annisa, 2002), hlm 54-55

³⁶ Moerti Hadiati Soeroso, *Op. Cit.* hlm.59

³⁷ Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemcahannya*,(Jakarta:PT Alumni, 2000),hlm. 61

seperti meninju, menendang, menampar, mendorong mencekik atau bahkan menyerang dengan senjata. Kebanyakan perempuan menganggap bahwa kekerasan yang dilakukan adalah kekhilafan sesaat.³⁸

Adapun terminologi kekerasan terhadap perempuan, mempunyai ciri bahwa tindakan tersebut :

- a. Dapat berupa fisik maupun nonfisik (psikis).
- b. Dapat dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidak berbuat).
- c. Dikehendaki atau diminati oleh pelaku.
- d. Ada akibat atau kemungkinan akibat yang merugikan pada korban (fisik atau psikis), yang tidak dikehendaki oleh korban.³⁹

2. Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup sebagai berikut:

1. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi didalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, perusakan alat kelamin perempuan dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan diluar hubungan suami isteri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi.
2. Kekerasan fisik seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas termasuk pemerkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual ditempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya.
3. Kekerasan secara fisik seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara, dimanapun terjadinya.⁴⁰

³⁸ Kholifah, *Sikap Islam Terhadap Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta:PT Citra Aditya Bakti, 2009), hlm 123

³⁹“Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (On-Line), Tersedia [http://repository.usu.ac.id/bitstream/1234/kekerasan dalam rumah tangga.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/1234/kekerasan%20dalam%20rumah%20tangga.pdf) diakses (21 oktober 2017)

Secara garis Besar, bentuk-bentuk kekerasan dapat dikelompokkan dalam lima bentuk kekerasan yaitu, kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikologi atau emosional, kekerasan ekonomi, kekerasan seksual, seorang perempuan korban kekerasan fisik tidak hanya mengalami satu bentuk kekerasan saja, bisa jadi dia mengalami beberapa jenis kekerasan (komulatif). Artinya mengalami beberapa jenis kekerasan atau kombinasi jenis-jenis kekerasan tersebut.⁴¹

Tindakan kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan yang kriminal. Hukum merupakan hal yang bisa dikatakan mempunyai pengaruh yang dominan dalam kehidupan manusia untuk mengarahkan kehidupannya ke arah yang lebih baik.⁴² Yochelson dan Same Now mengidentifikasi bahwa para penjahat adalah orang yang marah yang merasa suatu sense superioritas, menyangka tidak bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang melambung, tiap dia merasa ada suatu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan.⁴³ Hal itu dapat menjadi kekerasan terhadap perempuan. Perempuan mempunyai hak asasi yang diberikan oleh Islam bahwa seorang wanita harus dihormati dan dilindungi setiap saat, baik apa bila dia sebangsa dengan kita atau termasuk bangsa musuh. Seorang muslim tidak

⁴⁰ Achie Sudiarti Luhulima, *Op, Cit* hlm 185

⁴¹ Wawancara, Tri Apiani Pekerja Sosial di P2TP2A Provinsi Lampung 20 Oktober 2017

⁴² Andi Thahir, *Psikologi Kriminal*, (Bandar Lampung:2016).hlm 65

⁴³ Achie Sudiarti Luhulima, *Op, Cit*, hlm, 70

dibolehkan menyiksanya secara fisik dalam keadaan apapun, segala bentuk hubungan bebas pria dan wanita terlarang bagi nya, tanpa melihat pada status atau kedudukan wanita ataupun si wanita itu sendiri mau melakukan perbuatan itu.⁴⁴ Kasus kekerasan merupakan kasus yang merendahkan martabat manusia kekerasan yang tidak selalu dalam bentuk tindakan-tindakan yang membawa luka, tetapi dapat pula berupa sikap yang disadari atau tidak disadari, sesungguhnya berdampak merendahkan manusia.⁴⁵

3. Faktor Penyebab Kekerasan pada Perempuan dalam RumahTangga

Kekerasan didalam Rumah tangga lahir dipengaruhi oleh banyak variabel kebudayaan, hukum politik, ekonomi dan agama yang akar masalahnya sebagai berikut.

- a. Masyarakat memposisikan lembaga perkawinan sebagai sesuatu yang bersifat *Private Affair* (urusan pribadi) dan oleh karenanya orang lain tidak boleh ikut campur dalam persoalan rumah tangga. Implikasi dari persepsi ini mengakibatkan lahirnya persepsi bahwa apapun yang terjadi dalam lingkup rumah tangga termasuk tindak kekerasan terhadap anggota keluarga yang dilakukan oleh anggota keluarga yang lain, orang lain tidak boleh ikut campur.

⁴⁴ Maulanan Abdul A"la Maududi, *Hak-hak asasi manusia dalam islam*,(Jakarta:PT Bumi Aksara 2005), hlm 14

⁴⁵ Loekman Sutrisno, *Jalan Kemanusiaan Panduan Untuk memperkuat Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta:Lapera Pustaka Utama,1999), hlm 33

- b. Relasi suami istri bersifat struktural yang menempatkan suami sebagai kepala rumah tanggayang mempunyai otoritas penuh terhadap anggota keluarganya. Pada posisi ini suami mempunyai hak mengendalikan dan mengontrol secara penuh anggota keluarganya.
- c. Praktek kekerasan dalam rumah tangga lahir dipengaruhi oleh dominannya budaya patriarki dan legitilimasi tafsir keagamaan yang pada umumnya bias gender. Penyebab kekerasan dalam rumah tangga secara umum adalah kompleks. Wolley menemukan empat kategori penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan atau istri, antara lain:⁴⁶
- 1). Amukan dan frustasi oleh masalah yang tidak terselesaikan dari berbagai sumber.
 - 2). Penggunaan alkohol. meskipun keadaan mabuk sering menjadi alasan, tetapi bukan alasan untuk melakukan kekerasan.
 - 3). Perbedaan dalam status, seperti suami mempunyai pendidikan dan pendapatan yang lebih rendah dari pada istrinya.
 - 4). Ketakutan istri tergantung pada suami, pada hal suami tidak mampu menanggung

Strauss A.Murney Mengidentifikasi hal dominasi pidalam konteks struktur masyarakat dan keluarga. Yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (*marital violence*) sebagai berikut:

⁴⁶ Herlinawati (On-Line)<http://id.kekerasanpadaistr//465/id.wikipedia.org/wiki.pdf.Acces> (20 oktober 2017)

- a. Pembelaan atas kekuasaan laki-laki.; laki-laki dianggap sebagai superioritas sumber daya dibandingkan dengan wanita, sehingga mampu mengatur dan mengendalikan wanita.
- b. Diskriminasi dan pembatasan dibidang ekonomi. Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita (istri) ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka mengalami tindakan kekerasan.
- c. Beban pengasuhan anak. Konsep wanita sebagai hak milik bagi laki-laki menurut hukum, mengakibatkan kekuasaan laki-laki untuk mengatur dan mengendalikan segala hak dan kewajiban wanita. Laki-laki merasa punya hak untuk melakukan kekerasan terhadap wanita atau isrti nya.

Seringkali akibat dari tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menimpa korban secara langsung, tetapi juga anggota lain dalam rumah tangga secara tidak langsung. Tindak kekerasan seorang suami terhadap istri atau sebaliknya, misalnya dapat meninggalkan kesan negatif yang mendalam di hati mereka, anak-anak dan anggota keluarga lainnya kesan negatif ini pada akhirnya dapat pula menimbulkan kebencian dan malah benih-benih dendam yang tak berkesudahan terhadap pelaku. Bukan itu saja, rumah tangga yang di bangun untuk kepentingan bersama akan berantakan, tidak jarang sang pelaku turut menderita karena dpresi dan tekanan mental berlebihan yang dialaminya akibat penyesalan yang tidak ada gunanya lagi.⁴⁷

Budaya patriarki memiliki imbas negatif dalam kehidupan keluarga yang berlanjut kepada marginalisasi perempuan, aturan atau

⁴⁷ Mohammad"azzam manan' *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis*,"Jurnal Legislasi Indonesia, vol 5 no 3 September 2017. hlm 18

larangan dan sanksi dalam keluarga, ketidaksetaraan gender dan menyembunyikan kasus kekerasan.; hal ini mendorong timbulnya krisis dalam keluarga dan melahirkan kekerasan suami kepada istri.⁴⁸

4. Prinsip-prinsip Konvensi Perempuan

Konvensi Perempuan menekankan pada persamaan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki (*equality and equity*), yaitu persamaan hak dan kesempatan serta penikmatan manfaat di segala bidang kehidupan dan segala kegiatan. Konvensi perempuan mengakui bahwa:

Ada perbedaan biologis atau kodrat antara perempuan dan laki-laki.

- a. Ada perbedaan perlakuan yang berbasis gender yang mengakibatkan kerugian pada perempuan.
- b. Ada perbedaan kondisi dan posisi antara perempuan dan laki-laki, di mana perempuan ada dalam kondisi dan posisi yang lebih lemah karena mengalami deskriminasi di masa lalu atau karena lingkungan, keluarga, dan masyarakat tidak mendukung kemandirian perempuan.⁴⁹

Prinsip-prinsip yang dianut oleh konvensi perempuan perlu dipahami untuk dapat menggunakan konvensi sebagai alat untuk advokasi. Prinsip-prinsip konvensi perempuan dapat digunakan pula sebagai alat untuk

⁴⁸ <http://id.kekerasadalrumahtangga//465/id.wikipedia.org/wiki/pdf.Acces.tgl> 20 oktober 2017 pk1 11.41 wib

⁴⁹ Moerti Hadiati Soeroso, *Op Cit* hlm. 47

menguji apakah suatu kebijakan, aturan atau ketentuan mempunyai dampak.

Konvensi Perempuan didasarkan pada Prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Prinsip persamaan substantif, yaitu persamaan hak, kesempatan, akses dan penikmatan manfaat.
- b. Prinsip nondiskriminasi.
- c. Prinsip kewajiban negara.⁵⁰

5. Hak Perempuan Di Muka Umum

Segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan hendaknya ditiadakan, hal ini tertuang dalam pasal 15 Undang-Undang No 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, yang berbunyi:

- a. Negara-negara peserta wajib memberikan kepada wanita persamaan hak dengan pria di muka hukum.
- b. Negara-negara peserta wajib memberikan kepada wanita dalam urusan-urusan sipil kecakapan hukum yang sama dengan kaum pria dan kesempatan yang sama untuk menjalankan kecakapan tersebut, khususnya agar memberikan kepada wanita hak-hak yang sama untuk menandatangani kontrak-kontrak dan untuk mengurus harta benda, serta wajib memberikan mereka perlakuan yang sama pada semua tingkatan prosedur di muka hakim dan pengadilan.
- c. Negara-negara peserta bersepakat bahwa semua kontrak dan semua dokumen yang mempunyai kekuatan hukum yang ditujukan kepada pembatasan kecakapan hukum bagi wanita, wajib dianggap batal dan tidak berlaku.
- d. Negara-negara peserta wajib memberikan kepada pria dan wanita hak-hak yang sama berkenaan dengan hukum yang berhubungan dengan mobilitas

⁵⁰ *Ibid.* hlm.48

orang-orang dan kebebasan untuk memilih tempat tinggal dan domisili mereka.⁵¹

Adapun Kedudukan dan Peranan Perempuan pada umumnya dapat dibagi menjadi dua fungsi, yaitu sebagai berikut.

1. Perempuan sebagai istri dan ibu rumah tangga dan anggota keluarga, yang disebut fungsi intern.
2. Perempuan sebagai istri warga negara dan anggota masyarakat yang bergerak dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik, dapat disebut fungsi ekstern.⁵²

6. Pengertian Korban

Moerti Hadiati Soeroso berpendapat bahwa yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Korban pula diartikan sebagai sasaran, target dan obyek tindak kekerasan.⁵³

Secara Umum dapat disebutkan hak korban adalah sebagai berikut:

- a. Korban berhak mendapat kompensasi atas penderitaan, sesuai dengan kemampuan pelaku.

⁵¹ *Ibid.* hlm.50

⁵² *Ibid.* hl.53

⁵³ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung:Nuansa,20017), hlm. 47

- b. Korban berhak menolak kompensasi karena tidak memerlukannya.
- c. Korban berhak mendapatkan kompensasinya untuk ahli waris nya, bila korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- d. Korban berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
- e. Korban berhak menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya.
- f. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku, bila melapor dan menjadi saksi
- g. Korban berhak mendapat bantuan penasihat hukum.
- h. Korban berhak mempergunakan upaya hukum.⁵⁴

Adapun kewajiban korban adalah sebagai berikut:

- a. Korban tidak main hakim sendiri.
- b. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah terjadinya atau timbulnya korban lebih banyak lagi.
- c. Korban berkewajiban mencegah kehancuran si pelaku baik oleh diri sendiri, maupun oleh orang lain.
- d. Korban wajib ikut serta membina pelaku.
- e. Bersedia dibina atau membina diri sendiri agar tidak menjadi korban lagi.
- f. Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku.

⁵⁴ Moerti Hadiati Soeroso, *Op, Cit* hlm 53

- g. Berkewajiban memberi kesempatan kepada pelaku untuk memberi kompensasi secara bertahap atau sesuai dengan kemampuannya.
- h. Berkewajiban menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.⁵⁵

Adapun Hak dan kewajiban korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tercantum dalam pasal 10 sebagai berikut:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang.⁵⁶

Keterbukaan dan ketentuan Undang-Undang tersebut Membuat para Perempuan atau Istri lebih berani melapor tentang kekerasan fisik yang menimpanya, tentang kewajiban korban tidak diatur dalam Undang-Undang tersebut, tetapi menjadi kewajiban korban dan anggota masyarakat lain untuk melaporkan terjadinya tindak kekerasan. Hal ini tercantum dalam

⁵⁵ *Ibid.* hlm 55

⁵⁶ Undang-undang No 23 Tahun 2004, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal

ketentuan tentang kewajiban setiap warga masyarakat yang tercantum dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi: Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya, untuk:

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana.
- b. Memberikan perlindungan kepada korban.
- c. Memberikan pertolongan darurat.
- d. Membantu proses mengajukan permohonan penetapan perlindungan.⁵⁷

Pendampingan yang dilakukan pada Perempuan korban kekerasan fisik ini diharapkan untuk dapat

Dalam Proses Pendampingan disini Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Mempunyai Program Pendampingan Psikoterapi, dimana ada Perbedaan antara Psikoterapi dengan Konseling yaitu :

Pendampingan Psikis yaitu pendampingan yang dilakukan oleh konselor dalam membantu korban/klient dalam mengentaskan masalahnya.

Menurut *The American Psychological Association Division of counseling psychology*, Committee Definition mendefinisikan konseling sebagai sebuah proses membantu individu untuk mengatasi masalah-masalahnya dalam perkembangan dan membantu mencapai perkembangan yang optimal

⁵⁷ *Ibid*, hl.117

dengan menggunakan sumber-sumber dirinya.⁵⁸ Berdasarkan Perspektif pekerja sosial, konseling dapat dilakukan melalui tiga tahap, yakni membangun relasi, menggali masalah secara mendalam, dan menggali solusi alternatif.⁵⁹

a. Membangun relasi

Tahap ini melibatkan pertemuan awal antara Konselor dan klien. Konselor dituntut untuk memabngun suasana yang kondusif dan menyenangkan, sehingga klien tidak memiliki keraguan atau bahkan ketakutan dalam mengemukakan masalahnya. Konselor juga perlu menunjukkan sikap penerimaan, respect dan perhatian pada klien.

b. Menggali masalah secara mendalam

Pada tahap ini konselor dan klien terlibat dalam penggalian informasi secara lengkap dan mendalam mengenai kesulitan-kesulitan yang dialami klien. Dimensi masalah yang perlu digali pada tahap ini berkisar pada jenis masalah yang dialami klien, tingkat masalahnya, penyebab terjadinya masalah, perasaan klien mengenai masalah tersebut terjadi. Konselor jangan tergesa-gesa untuk segera meberikan solusi sesaat setelah masalah klien teridentifikasi.

c. Menggali Solusi Alternatif

Setelah masalah diyakini terungkap secara mendalam, tahap berikutnya yang dilakukan konselor dengan klien adalah menggali berbagai kemungkinan yang dapat dijadikan alterantif pemecahan masalah. Peran

⁵⁸ Gantina Komalasari,dkk, *Teori dan Tekhnik Konseling*(Jakarta:PT Indeks, 2011),hlm.9

⁵⁹ Edi Suharto, *Pekerja Sosial Di Dunia Industri* (Bandung:Alfabeta,2009), hlm 28

konselor pada tahap ini umumnya mengidentifikasi beberapa alternatif untuk kemudian menggalinya bersama klien guna mencari kecocokan, kelebihan dan keterbatasan dari setiap alternatif-alternatif tersebut

Adapun pengertian Psikoterapi dan Konseling yaitu:

1. Psikoterapi adalah teknik pemberian bantuan kepada klien sehingga dapat mengubah pola hidup yang dirasa dengan mengembangkan perasaan-perasaan yang lebih memuaskan tentang dirinya sendiri dan tentang hubungan kemasyarakatan, dengan demikian, melalui psikoterapi, klien tertolong untuk dapat mengenal serta menghadapi problemnya serta bertanggung jawab untuk memecahkannya yang pada akhirnya ia mampu mengembangkan sikap dan teknik, tidak saja untuk memecahkan problem masa sekarang, tapi juga memperbesar daya kegunaannya sebagai makhluk sosial
2. Sedangkan Guidance Counseling adalah pemberian bantuan yang diberikan secara sistematis kepada orang lain atau client dengan menggunakan berbagai metode atau teknik agar orang yang bersangkutan mampu memecahkan segala permasalahan yang ia hadapi, baik itu problem bersifat pribadi yang merupakan gangguan perasaan, frustrasi dan kesulitan dalam menentukan pilihan yang tepat dengan kemampuannya dalam belajar.⁶⁰

⁶⁰ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah 2010), hlm 133

Konseling sebagai profesi bantuan (*Helping Profession*) Sebagai profesi bantuan, konseling merupakan pelayanan masyarakat yang diberikan konselor profesional yang karena keperibadiannya, pengetahuan dan keterampilannya, serta pengalamannya dalam bidang konseling. mengabdikan diri untuk membela harkat dan martabat kemanusiaan dengan cara memfasilitasi perkembangan individu dan kelompok, agar individu tersebut dapat mengembangkan dirinya sebagai pribadi dan sebagai warga masyarakat yang memiliki motivasi.⁶¹

Hartono (1995) menyatakan kode etik Profesi konseling sedikitnya memiliki tiga peran penting yaitu:

- 1). Sebagai pagar bagi anggota yang berfungsi sebagai batas moral atau pedoman antara lain hal-hal yang dianjurkan dengan yang terlarang, antara yang dianggap lurus dan menyimpang.
- 2). Sebagai pembatas suatu ikatan profesi yang lain, baik mengenai keahlian yang digeluti, ruang lingkup dan jenisnya maupun wewenang yang dimilikinya.
- 3). Agar para konselor tetap dapat menjaga standar mutu dan status profesinya dalam batas-batas yang jelas dengan profesi lain, sehingga dapat dihindarkan kemungkinan-kemungkinan penyimpangan yang dapat merugikan konseli.⁶²

⁶¹ Hartono, Boy Sudarmasji , *Psikologi Konseling* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group 2013) hlm,33

⁶² *Ibid*, hlm 34

BAB III

PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (PTP2A) DALAM UPAYA USAHA PENDAMPINGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN FISIK

A. Gambaran Umum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

1. Sejarah Berdirinya

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) ini adalah program nasional, jadi setiap kabupaten atau kota dianjurkan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai tempat yang menangani kasus kekerasan (kekerasan pada perempuan dan anak), awal pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Lampung yaitu dilatar belakangi oleh banyaknya kasus tindak kekerasan yang terjadi baik di lingkungan rumah tangga atau publik terhadap perempuan dan anak. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dibentuk dalam kerangka peningkatan peran dan kualitas perempuan serta perlindungan anak dari tindakan-tindakan yang merugikan juga mengancam mereka, sehingga perlu dibentuk dan dikembangkan suatu partisipasi masyarakat dikembangkan dan kerjasama antar masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) juga sebagai Pusat Perlindungan Perempuan bagi perempuan seperti perlindungan di bidang pendidikan, perlindungan di bidang

kesehatan, perlindungan dibidang ekonomi, perlindungan dibidang hukum dan perlindungan dibidang politik lainnya.⁶³

Semuanya ini dikatakan, untuk memberikan peningkatan pelayanan kepada perempuan dan anak, dengan banyaknya kasus yang terjadi terhadap perempuan dan anak. Sampai saat ini Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Lampung memiliki peran ganda dalam Wahana pelayanan perlindungan perempuan dan perlindungan anak yang berbasis masyarakat. Pelayanan yang berperan dalam upaya pemenuhan kebutuhan peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak serta peningkatan posisi dan kondisi perempuan dalam masyarakat

Upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender antara laki-laki dan perempuan, mengingat kualitas hidup perempuan masih jauh tertinggal dari laki-laki hampir di seluruh bidang pembangunan terutama bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Pusat data dan informasi, pusat rujukan dan memberikan berbagai jenis pelayanan baik fisik maupun psikologis.

2. Visi dan Misi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Adapun yang menjadi Visi dan Misi berdirinya P2TP2A Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

⁶³ Sumber: *Profil P2TP2A Provinsi Lampung*, Tahun 2017

- 1). Visi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Lampung yaitu Terwujudnya anak dan perempuan di Provinsi Lampung yang terhindar dari ancaman kejahatan dan tindak pidana lainnya demi menegakkan Hak Azasi Manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai Warga Negara.
- 2). Misi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Yaitu :
 - a. Memberikan layanan secara mudah dan cepat kepada korban
 - b. Menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan rehabilitasi kesehatan, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum
 - c. Melakukan jejaring dengan Rumah Sakit dan Dinas Sosial untuk penagnanan korban melalui rujukan
 - d. Melakukankerjasama lembaga pemerintah antar Provinsi dalam rangka Rehabilitasi Sosial pemulangan korban ⁶⁴
3. Tujuan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Lampung
 - a. Memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, untuk meningkatkan kondisi, peran dan perlindungan perempuan dan anak.

⁶⁴ Sumber: *Profil P2TP2A Provinsi Lampung Way Halim*, Tahun 2017

- b. Memfasilitasi Kebutuhan Perempuan dan anak Korban kekerasan dalam memenuhi hak korban yaitu hak atas kebenaran, hak atas perlindungan, hak atas keadilan dan hak atas pemulihan dan pemberdayaan.
4. Program-program Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Lampung antara lain:
- a. Program Pencegahan
 - b. Program Penanganan
 - c. Program Pemulihan
 - d. Rehabilitasi Sosial⁶⁵

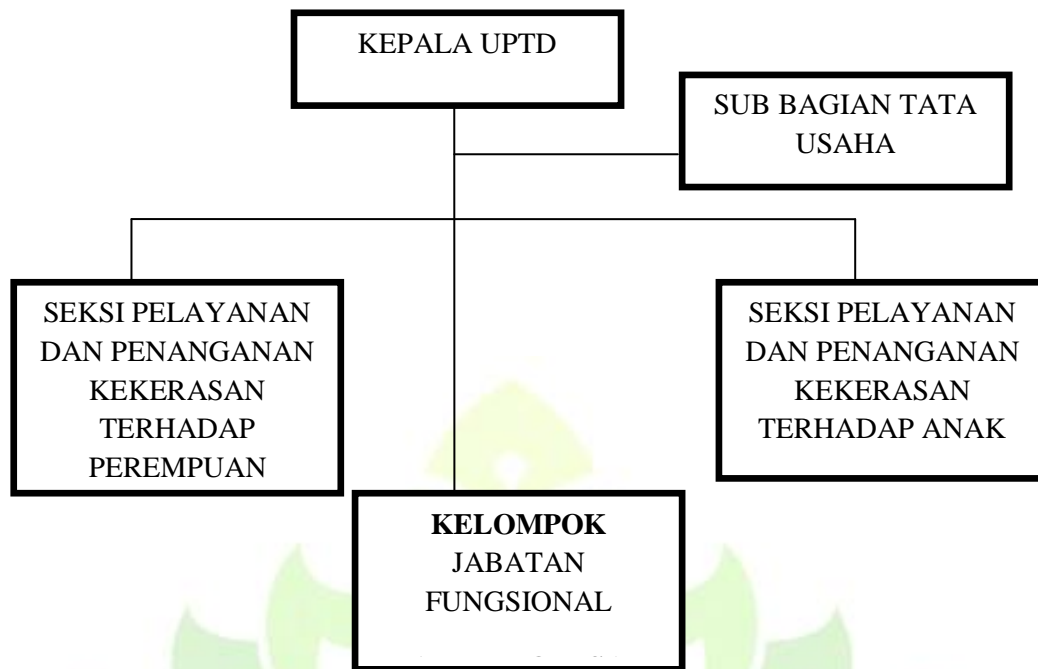
Program-program Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Lampung sampai saat ini berjalan sesuai yang diharapkan namun partisipasi masyarakat yang masih belum 100% untuk dapat bekerja sama dikarenakan banyak masyarakat yang masih menutup mata dalam tindak KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) atau Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

⁶⁵ Dokumentasi P2TP2A Provinsi Lampung, Tahun 2017

5. Struktur Organisasi P2TP2A Provinsi Lampung

Bagan 1

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PELAYANAN TERADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK



Sumber :Dokumentasi P2TP2A Provinsi Lampung 20 Oktober 2017

TIM Pendamping yang ada di P2TP2A Povinsi Lampung Way Halim hingga saat ini berjumlah 25 Orang dengan perincian Kepala P2TP2A 1 orang, Pekerja Sosial 11 Orang , 3 Pengacara, 3 Psikolog, 7 Orang Pendamping.

Tabel 1.1
Data Penanganan Kasus Tahun 2017 P2TP2A Provinsi Lampung

No	Jenis Kasus	Jumlah
1	Kekerasan Psikis	9
2	Kekerasan Fisik	10
3	Kekerasan seksual	19
4	Hak Asuh Anak	2
5	Perceraian	8
6	TPPO	1
7	Penelantaran	8

Sumber :Dokumentasi P2TP2A Provinsi Lampung 20 Oktober 2017

Tabel.1.2

Data Pekerja Sosial/Karyawan P2TP2A Provinsi Lampung

No	Nama	Jabatan
1	Amir	Kepala PTP2A
2	Yurni	Konselor
3	Ratna Yanuana Setiawati	Tim Pendamping
4	Ahmad Bakri	Kasi Pelayanan dan Penanganan kekerasan Terhadap Perempuan
5	Julia Siti Aisyah	Konselor
6	Aira Damayanti Yuarsa	Tim Pendamping
7	Tri Apiani	Pekerja Sosial
8	Susi Mardiana	Pekerja Sosial
9	Okta Yani	Pekerja Sosial
10	Sulastri	Pekerja Sosial
11	Intan mardiyah	Pekerja Sosial
12	marfu'ah	Pekerja Sosial
13	Sinta Setiawati	Pekerja Sosial
14	Sudirman	Tim Pendamping
15	Debi sinta	Kasi Pelayanan dan Penanganan kekerasan Terhadap Perempuan
16	Ibrahim	Kasi Pelayanan dan Penanganan kekerasan Terhadap Perempuan
17	Kartika Musiah	Tim Pendamping
18	Marina rizki	Tim Pendamping
19	Vera dwigita	Tim Pendamping
20	Ayu andani	Kasi Pelayanan dan Penanganan kekerasan Terhadap Perempuan
21	Sinta mar'ah	Tim Pendamping
22	Wulandari okta	Tim Pendamping
23	Yulinda sari	Tim Pendamping
24	Agus Mukhandar	Supir
25	Arif Purwo	Koki

Sumber : Dokumentasi pada tanggal 21 oktober 2017

Adapun Tabel Kasus yang ditangani Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 2013-2017

Tabel 1.3

Tahun	Jumlah Kasus
2013	84 kasus
2014	177 kasus
2015	199 kasus
2016	83 kasus
2017	57 kasus

Sumber : Dokumentasi pada tanggal 20-24 Oktober 2017

B. Program Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan di P2TP2A

Program yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Lampung dalam mengatasi masalah kekerasan yaitu Program Pencegahan, Program Pelayanan, dan Program Pemulihan Sebagai berikut:

1. Program Pencegahan

a. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan berupa sosialisasi memperkenalkan adanya lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang bertujuan memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan serta berupaya

memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Selain memperkenalkan P2TP2A, sosialisasi mengenai bentuk-bentuk Kekeraan, hukuman bagi pelaku kekerasan dan lain sebagainya, sebagaimana dikatakan Ibu Aira sebagai Tim Pendamping sebagai berikut:

“Kita sudah melakukan sosialisasi bahwa ada P2TP2A, sosialisasi bahwa kekerasan itu bentuknya seperti apa saja, sosialisasi bahwa pelaku-pelaku kekerasan bisa kena hukuman apa saja terus selain sosialisasi secara pribadi. Jadi dimanapun kita berada melihat tindakan yang memang itu bersifat kekerasan dan kita tahu apa itu kekeraan wajib memberi tahu bukan malah menutup sebelah mata, paling tidak kita memberi tahu bahwa itu adalah salah.”⁶⁶

b. Penyuluhan

Penyuluhan dilakukan untuk memberikan informasi ke masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kekerasan dan pencegahannya, sebagaimana dikatakan oleh ibu Julia, ketika diwawancarai penulis sebagai berikut :

“Contohnya adalah di tim penggerak PKK. Tim Penggerak PKK kan mereka juga punya program untuk penanganan kekerasan, nah kita suka masuk kesana , jadi kita masukkan ilmu-ilmunya, mereka sebagai penggeraknya”⁶⁷

Hal serupa yang dikatakan ibu Tri Apiani yaitu :“ya itu tadi dari divisi saya ada penyuluhan anti kekerasan, kita berikan penyuluhan kepada

⁶⁶ Aira, Tim Pendamping P2TP2A Provinsi Lampung, wawancara 21 oktober 2017

⁶⁷ Julia, Konselor P2TP2A Provinsi Lampung, Wawancara 20 oktober 2017

masyarakat bahwa dampak hukum dari kekerasan itu menakutkan, itu kita sosialisasikan di lembaga-lembaga sosial.”⁶⁸

b. Program Penanganan

1. Pemberian Layanan

Seperti sudah dijelaskan bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) memberikan pelayanan bagi korban Kekerasan berupa pelayanan medis, pelayanan psikis, dan pelayanan hukum sebagaimana dikatakan Ibu Ratna :

“selain sosialisasi, upaya yang kita lakukan ya kita memberi pelayanan, pelayanan kekerasan untuk mengatasi masalahnya entah itu pelayanan hukum, pelayanan psikologi, pelayanan konsultasi perkawinan, pelayanan medis, penyelsainnya tercipta sesuai dengan visi dan misi P2TP2A”⁶⁹

Hal serupa wawancara ibu Aira :“Upaya dari segi penanganan yang sudah dilakukan kita ada tiga bidang nih, pertama bidang pelayanan yang membawahi pelayanan medis, psikis dan hukum,Jadi Upaya Penanganan untuk mengatasi masalah Kekerasan yaitu memberikan pelayanan bagi klien atau korban seperti pelayanan medis, pelayanan psikis, pelayanan hukum dan konseling perkawinan”

⁶⁸ Tri Apiani, Pekerja Sosial P2TP2A Provinsi Lampung, *wawancara* 20 oktober 2017

⁶⁹ Ratna, Tim Pendamping P2TP2A Provinsi Lampung, *wawancara* 20 oktober 2017

c. Program Pemulihan

1. Pemberdayaan

Pemberdayaan disini yaitu pemberdayaan perempuan melalui pelatihan-pelatihan agar perempuan korban kekerasan dapat mandiri dan tidak bergantung secara ekonomi oleh suami, P2TP2A telah mampu melakukan pemberdayaan kepada perempuan dalam bidang sosial ekonomi.

Seperti yang dikutip dari wawancara Ibu Aira: “pemberdayaan perempuan biasanya kita bekerja sama dengan PKBM ataupun PKM untuk memberdayakan para wanita korban kekerasan”⁷⁰

2. Rehabilitasi Sosial

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Yulia Tim Pendamping Perempuan, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menangani kasus yang dirujuk ke pelayanan rehabilitasi sosial yaitu seseorang yang terlanter korban kekerasan. Pemulihan bagi klien atau korban kekerasan yang dirujuk ke pelayanan rehabilitasi sosial memang belum ada, tetapi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) akan merujuk ke dinas sosial untuk rehabilitasi sosial apabila ada klien atau korban kekerasan dengan kondisi psikis yang sudah parah, sebagaimana dijelaskan ibu Ratna sebagai berikut :

⁷⁰ Aira, Tim Pendamping P2TP2A Provinsi Lampung, wawancara 20 oktober 2017

“rehabnya yang kita harapkan untuk merehab mereka korban kekerasan. Jadi mereka yang misalnya yang sudah berat sekali ya gitu secara psikis mereka akan sulit untuk kembali kemasyarakat, nah itu kita kembalikan mereka ke rehab untuk membawa mereka kembali kepada masyarakat.”⁷¹

C. Usaha Pendampingan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

1. Usaha Pendamping

Adapun Usaha Pendampingan yang dilakukan Oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

- a. Memberikan pendidikan adil gender dan anti kekerasan kepadapublik.
- b. Membangun kerjasama dengan APH, lembaga-lembaga pelayanan dan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan secara terpadu serta mendorong penyelesaian kasus .
- c. Melakukan lobby untuk membangun kesadaran dan keberpihakan kepada korban bagi Aparat Penegak Hukum, Aparat Pemerintah Daerah dan Legislatif.
- d. Melakukan kampanye dan aksi bersama untuk membangun opini masyarakat tentang anti kekerasan.

⁷¹ Ratna, Tim Pendamping, *wawancara* , 20 oktober 2017

- e. Membangun dan melibatkan organisasi-organisasi masyarakat untuk melakukan pendampingan perempuan korban kekerasan.

Dalam hal ini yang menjadi Sasaran dari Lembaga P2TP2A yaitu:

1. Perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan terhadap kekerasan
2. Perempuan dan anak yang memerlukan akses informasi mengenai kekerasan, dampak dan penanganan
3. Perempuan dan anak yang memerlukan akses informasi tentang KDRT, perlindungan anak, trafiking dan bentuk kekerasan lainnya

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Yulia ketika diwawancarai penulis mengatakan: “Kekerasan yang alami oleh perempuan bukanlah suatu hal yang disetujui ataupun yang diingkin oleh semua orang khususnya perempuan, namun penindakan terhadap tindak kekerasan bukanlah suatu hal mudah untuk dilakukan, namun dengan adanya lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) ini dapat membantu perempuan angkat bicara dan dapat bertindak”⁷²

Sedangkan Menurut Ibu Aira : “Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak ini sangat membantu keadaan psikologis dari perempuan itu sendiri, namun perempuan

⁷² Yulia, Psikolog P2TP2A Provinsi Lampung, *Wawancara*, 19 oktober 2017

jarang mau menceritakan permasalahan yang ia alami karena menurutnya hal yang ia alami itu adalah aib”⁷³

Hal ini Ditegaskan Kembali oleh Ibu Ratna dalam hasil wawancara dengan penulis: “ pentingnya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) ini bukan hanya membantu namun kami dari lembaga ingin dan menekan agar perempuan dan anak dapat angkat bicara dan bertindak dan menyelesaikan masalah-masalah mereka dan memperlihatkan bahwa pemerintah peduli dengan mereka, dengan adanya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) ini banyak mereka yang sudah berani angkat bicara”.⁷⁴

Adapun Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Merupakan perlindungan bagi masyarakat yang merupakan korban dari kekerasan. Seperti dikutip dari wawancara pak Bakri:

“Dalam memberikan perlindungan dan penanganan korban kekerasan, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Lampung melakukan hal- hal berikut:

a. Memberikan layanan secepat mungkin dan “tanpa biaya”

⁷³ Aira, Tim Pendamping P2TP2A Provinsi Lampung, *Wawancara*, 19 oktober 2017

⁷⁴ Ratna, Tim Pendamping P2TP2A Provinsi Lampung, *Wawancara*, 19 oktober 2017

kepada korban

- b. Menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan hak korban atas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum
- c. Melakukan kerja sama dengan lembaga tertentu dalam penyediaan pendamping yang diperlukan bagi korban Melakukan jejaring dengan rumah sakit pemerintah atau swasta untuk perawatan dan pemulihan kesehatan korban serta melakukan kerjasama dengan lembaga perlindungan. saksi dan korban, rumah

Perlindungan sosial atau pusat trauma milik pemerintah masyarakat atau lembaga lembaga lainnya untuk pemulihan kesehatan korban Memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan Korban”⁷⁵

Dan menurut pak Amsir Dalam penyelenggaraan layanan terpadu maka Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mempunyai Penanganan pengaduan dan pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan yaitu :

⁷⁵ Ahmad Bakri. Kasi Pelayanan dan Perlindungan Kekerasan Terhadap Perempuan , wawancara 20 oktober 2017

- a. Penyelenggaraan rujukan kasus yang memerlukan pelayanan kesehatan dan konseling bagi perempuan dan anak korban kekerasan
- b. Memfasilitasi rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
- c. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan
- d. Pemulanan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan⁷⁶

2. Tujuan Pendampingan Psikososial Pada Korban Kekerasan Fisik

Secara umum tujuan yang akan dicapai dalam proses pendampingan Psikososial yaitu agar korban mampu memahami persoalan yang dialami secara lebih multidimensional dan membantu korban mengambil keputusan terbaik bagi dirinya.

Hal yang diungkapkan ibu Aira sebagai berikut Tujuan dari Pendampingan Psikososial yaitu :“Perempuan tidak mempunyai keberanian karena tindak kekerasan jadi dengan adanya pendampingan dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dapat

⁷⁶ Amsir, Kepala UPTD-P2TP2A Provinsi Lampung, wawancara, 20 oktober 2017

membangkitkan kembali rasa percaya diri agar mereka mau bertindak dan melaporkan kepada pihak yang berwajib”⁷⁷

Serta hal yang sama diungkapkan oleh ibu yulia tentang tujuan pendamping bahwa:“yaitu membantu korban menemukan dan menggunakan potensi-potensi dirinya dan membantu korban mencegah dan menghadapi masalah di masa datang

3. Proses Kegiatan Pendamping Perempuan Korban Kekerasan Fisik

Mendefinisikan persoalan, eksplorasi atau identifikasi kebutuhan untuk perubahan, persepsi baru dan mengembangkan pemahaman serta mengembangkan tujuan yang meliputi mengembangkan alternatif rencana partisipasi dan korban.⁷⁸

Seperti yang dikutip wawancara Bapak Bakri :“ Proses yang dilakukan pada saat pendampingan yaitu pertemuan yang tidak dilakukan satu kali melainkan berkali-kali, karena pada saat pertemuan pertama kita melakukan pendekatan pada si korban, jika kita sudah mempunyai kemisteri terhadap korban maka korban akan lebih mudah menceritakan masalah yang dia alami”⁷⁹

⁷⁷ Aira, tim pendamping P2TP2A Provinsi Lampung, wawancara 19 oktober 2017

⁷⁸ yulia, Konselor P2TP2A Provinsi Lampung, wawancara , 20 oktober 2017

⁷⁹ bakri, kasi pelayanan dan perlindungan kekerasan terhadap perempuan,wawancara 20 oktober 2017

Hal serupa yang dikatakan oleh pak Yurni yaitu :“Sebuah proses pendampingan melalui jangka waktu yang panjang dikarenakan si korban harus mempunyai kepercayaan terhadap si pendamping dalam menceritakan masalah yang dia alami”⁸⁰

Adapun Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan Pendampingan ini yaitu :

1. Kepala UPTD-P2TP2A

Kepala UPTD-P2TP2A adalah orang yang bertanggung jawab atas program yang ada di Lembaga P2TP2, dan orang-orang yang melakukan pelatihan ini, dari mulai melakukan Sosialisasi Program, mencari Sasaran dengan tujuan program

2. TIM Pendamping

yaitu sebagai TIM yang melakukan Pendampingan pada Perempuan Korban kekerasan yang memberikan arahan, ilmu dan motivasi kepada Para Korban yang ada di Provinsi Lampung.

Seperti yang diungkapkan ibu Tri Apiani sebagai berikut :“ saya disini menjadi salah satu Tim Pendamping Perempuan korban kekerasan fisik, memberikan arahan dan Motivasi kepada para korban kekerasan, karena dengan melihat kondisi masyarakat yang jarang sekali peduli dengan masalah hal yang demikian”.⁸¹ Terkait dengan tenaga Tim Pendamping yang harus

⁸⁰ Yurni, Kordinator P2TP2A, Wawancara 21 Oktober 2017

⁸¹ Tri Apiani, Pekerja Sosial P2TP2A Provinsi Lampung, Wawancara 20 Oktober 2017

mempunyai, kualifikasi, peran, dan wawasan yang luas dalam melakukan pendampingan perempuan korban kekerasan fisik.

Seperti yang diungkapkan Ratna bahwa: “peran saya disini sebenarnya punya tanggung jawab yang besar mbak, karena kami harus melakukan pendekatan-pendekatan kepada korban yang tidak hanya sekali namun berkali-kali agar si korban dapat menceritakan masalah yang dia alami.”⁸²

4. Jenis-jenis Kekerasan Terhadap Perempuan

Adapun jenis-jenis kekerasan yang pernah ditangani oleh lembaga P2TP2A Provinsi Lampung yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Penelantaran Ekonomi, Hak asuh anak, kekerasan Seksual dan perceraian.

Seperti yang dikutip dari wawancara pak Yurni bahwa: “kekerasan yang paling sering dialami pada perempuan yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) karena banyak laki-laki yang merasa bahwa dirinya yang paling berkuasa dan mereka menganggap bahwa perempuan itu tidak berani bertindak atas apa yang terjadi dengan mereka”⁸³

Hal senyampang yang diungkapkan oleh Ibu Yulia: “disini kami akan membantu semaksimal mungkin perempuan yang mengalami korban kekerasan fisik ini, dimana mereka hilang percaya diri dan kami akan membangkitkan rasa percaya dirinya itu”

⁸² Ratna, Tim Pendamping P2TP2A Provinsi Lampung, *Wawancara* 20 Oktober 2017

⁸³ Yurni, Psikologi P2TP2A Provinsi Lampung, *Wawancara* 21 Oktober 2017

Adapun Sistematika pendampingan Perempuan Korban Kekerasan fisik

1. Sistem Pendampingan

Ada beberapa sistem Pendampingan yang dilakukan Lembaga P2TP2A Provinsi Lampung yaitu:

- a. Sistem Autris atau penjangkauan dimana lembaga akan mendatangi korban kekerasan ditempat korban itu sendiri
- b. Korban yang langsung melapor atau mendatangi lembaga P2TP2A untuk meminta bantuan
- c. Sistem Lempar bola yang dimaksud disini yaitu lembaga mengetahui adanya korban kekerasan melalui media Televisi atau media lainnya bahwa ada tindak kekerasan
- d. Saudara atau kerabat dekat yang melapor bahwa adanya tindak kekerasan

Seperti yang dikutip dari wawancara Ibu Aira yaitu: “sebelum kami melakukan pendampingan pada korban kami akan melakukan attending pendekatan pada klien, dalam melakukan Pendampingan kami mendengarkan apa yang mereka keluh kesahkan dan tidak menyalahkan korban, tapi kami lebih mendengarkan penderitaan dia dan pada akhirnya kami memberi pilhan pada si korban untuk melaporkan masalahnya atau cukup sampai disini.”⁸⁴

Hal serupa yang disampaikan oleh pak Yurni yaitu: “kami lebih mendekatkan diri secara personal, karena mereka terkadang tidak ingin bicara

⁸⁴ Aira, Tim Pendampingan P2TP2A Provinsi Lampung, *Wawancara* 20 Oktober 2017

karena mereka menganggap itu adalah sebuah aib dimana mereka akan malu jika di bicarakan dengan orang lain namun kita akan terus berusaha untuk menggali permasalahan korban lebih dalam”⁸⁵

2. Metode

Proses pendampingan merupakan pemeran utama dari tahap pelaksanaan program kegiatan yang di lakukan oleh Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Hal ini dikarenakan suatu program pendampingan merupakan salah satu program yang sangat membantu masyarakat yang mengalami kekerasan baik itu perempuan maupun anak. untuk itu, Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan dan Anak menggunakan beberapa metode yaitu:

- a. Metode Pendekatan secara Personal terhadap korban
- b. Interview
- c. Resolusi Tranferesi

Dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, yang utama dilakukan adalah membuat Korban Kekerasan Fisik merasa aman dan nyaman sehingga dapat terbangun kemistri dan mereka dapat menceritakan masalah mereka tanpa takut masalah mereka akan terbongkar kepada orang lain.

⁸⁵ Yurni, Konselor P2TP2A Provinsi Lampung, wawancara 20 oktober 2017

Hal tersebut sesuai dengan Pernyataan Ibu Tri salah seorang informan:
“Kegiatan Pendampingan ini harus dilakukan pendekatan secara personal yang dilakukan secara tertutup dan ada interview korban dan pendamping di ruang konseling.”⁸⁶

3. Kendala dalam proses pendampingan

- a. Klien atau korban yang pasif
- b. Klien atau korban cerita berbohong
- c. Klien susah mengekspresikan perasaan

Seperti yang dikutip dalam wawancara pak yurni berikut: “kami sering mengalami kendala klien pada saat proses pendampingan, terkadang klien yang susah bicara atau pasif, ada juga klien yang mengarang cerita, dan ada juga klien yang susah mengekspresikan perasaan”⁸⁷

4. Evaluasi kegiatan Pendampingan

Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dari pelaksanaan program pendampingan di Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Lampung. Dan sejauh ini proses pendampingan yang dilakukan sudah berhasil karena pendampingan dilakukan sampai korban mendapatkan kepercayaan diri kembali serta berani bertindak.

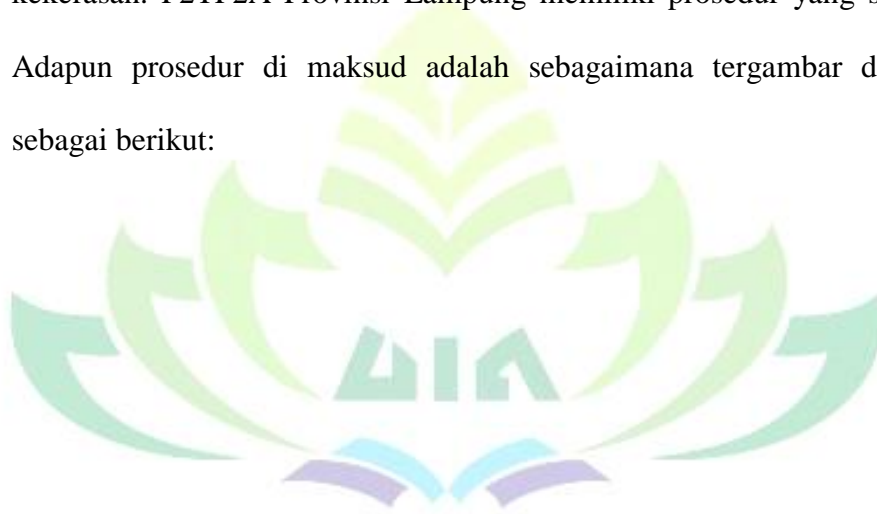
⁸⁶ Tri Apiani, Pekerja Sosial P2TP2A Provinsi Lampung, wawancara 20 oktober 2017

⁸⁷ Yurni, Konseleor P2TP2A Provinsi Lampung, wawancara 20 oktober 2017

Seperti yang diungkapkan ibu Aira sebagai berikut:“ sejauh ini apa yang telah kami lakukan berhasil sampai mereka benar menajdi percaya diri, jika mereka sudah percaya diri, berarti mereka sudah berani bertindak dan melapor ke pihak yang berwajib”⁸⁸

5. Mekanisme Layanan Dan Penerimaan Pengaduan bagi Perempuan Korban Kekerasan di P2TP2A Provinsi Lampung

Dalam memberikan pelayanan dan penerimaan pengaduan bagi korban kekerasan. P2TP2A Provinsi Lampung memiliki prosedur yang sudah baik. Adapun prosedur di maksud adalah sebagaimana tergambar dalam tabel sebagai berikut:

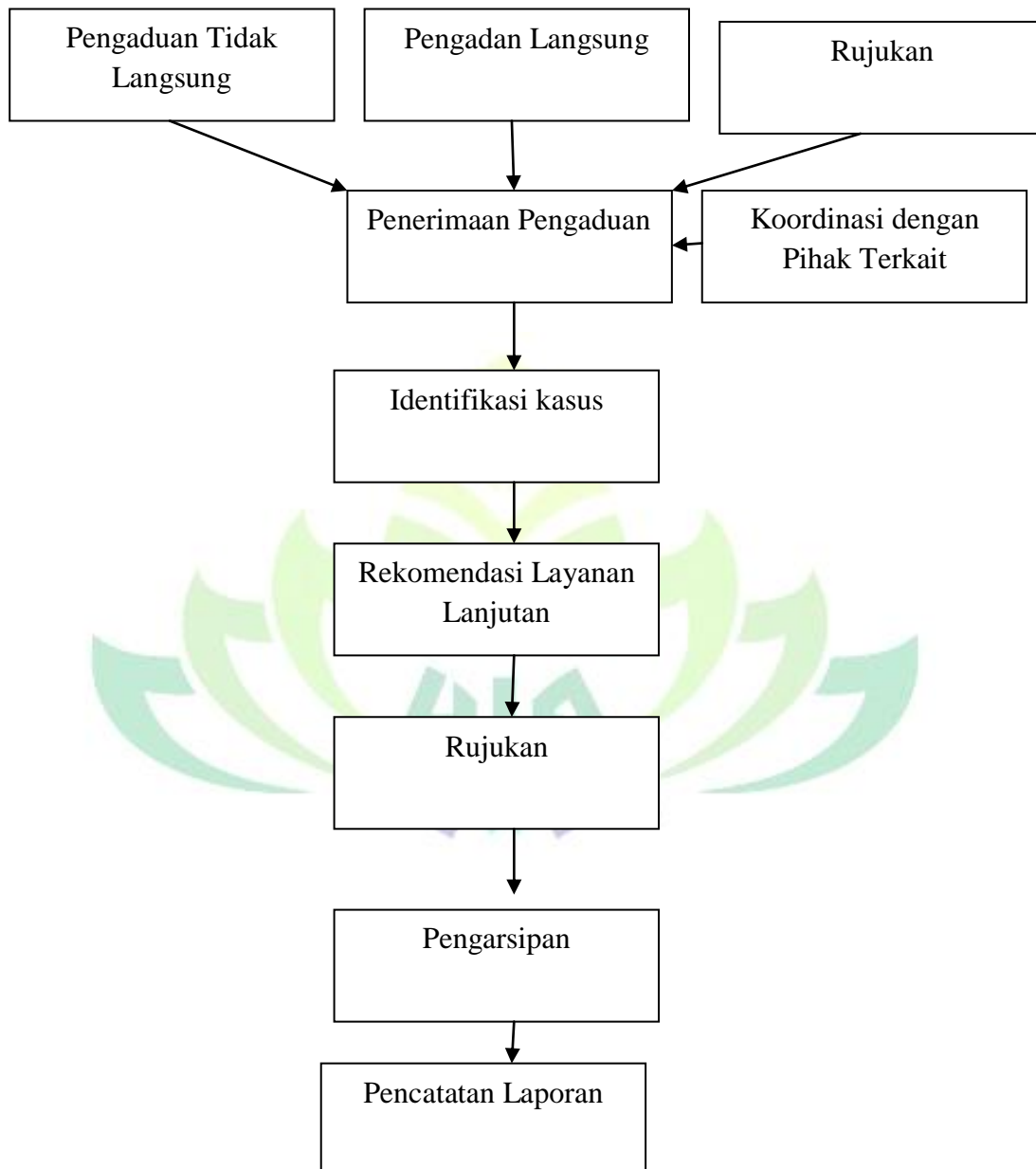


⁸⁸ Aira, Tim Pendamping P2TP2A Provinsi Lampung, wawancara 20 Oktober 2017

a. Proses pelayanan

Tabel 1.4

Proses Pelayanan P2TP2A Provinsi Lampung Way Halim



Sumber data P2TP2A Provinsi lampung 20 oktober 2017

b. Bantuan secara Hukum dan Non Hukum

Secara Hukum:

- 1) Di Kepolisian pendampingan pada saat pelaporan, pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), memberikan masukan pasal-pasal yang digunakan, lobby dan monitoring perkembangan kasus.
- 2) Di Kejaksaan melakukan lobby dalam penyusunan dakwaan, tuntutan dan monitoring perkembangan kasus.
- 3) Di Pengadilan pendampingan pada saat persidangan, membuat surat dukungan untuk tuntutan dan putusan, Monitoring perkembangan kasus.
- 4) Mengusulkan JPU agar menerima atau banding terhadap hasil putusan.

Secara Non Hukum:

- 1). Bantuan dan pendampingan medis untuk pengobatan luka dan *visum et repertum*
- 2). Bantuan psikososial dan spiritual dengan konseling rutin untuk mengatasi dampak traumaà kembali percaya diri
- 3). Rujukan ke *shelter* rumah aman kerjasama dengan Dinas Sosial Lampung
- 4). Pelayanan sosial dan akses keterampilanà pendidikan life skill
- 5). Memperkuat korban untuk menyelesaikan kasusnya melalui jalur hukum dan memberikan pendampingan

Pendampingan psikologis adalah pendampingan kepada klien atau korban yang memberikan sarana agar klien dapat terbantu menyelesaikan masalah traumatisnya seperti di lembaga P2TP2A pendampingan dilakukan untuk memotivasi klien dan mengembalikan rasa percaya diri klien untuk dapat bertindak.

Seperti yang dikutip dari wawancara ibu Tri bahwa:“saya adalah TIM Pendamping psikologi jadi saya disini memberikan bantuan secara Non Hukum dimana saya memberikan penguatan kepada si korban untuk menyelesaikan kasusnya hingga ke jalur hukum serta memberikan rujukan kerumah aman dengan dinas sosial lampung”⁸⁹

c. Strategi Penanganan Kasus pada UPTD P2TP2A

1. Memberikan pendidikan adil gender dan anti kekerasan kepada publik.
2. Membangun kerjasama dengan APH, lembaga-lembaga pelayanan dan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan secara terpadu serta mendorong penyelesaian kasus .
3. Melakukan lobby untuk membangun kesadaran dan keberpihakan kepada korban bagi Aparat Penegak Hukum, Aparat Pemerintah Daerah dan Legislatif.
4. Melakukan kampanye dan aksi bersama untuk membangun opini masyarakat tentang anti kekerasan.

⁸⁹ Tri Apiani, pekerja sosial P2TP2A Provinsi Lampung, wawancara 20 oktober 2017

5. Membangun dan melibatkan organisasi-organisasi masyarakat untuk melakukan pendampingan perempuan korban kekerasan.
6. Membentuk forum koordinasi dan melakukan koordinasi, keanggotannya berasal dari instansi terkait dan masyarakat yang peduli terhadap penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
7. Koordinasi dilakukan oleh badan yang khusus membidangi pemberdayaan perempuan dan anak (*sbg leading sector*).
8. Tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani melakukan kerjasama dalam melaksanakan pemulihan korban.⁹⁰

d. Prinsip-prinsip umum Layanan P2TP2A

1). Non deskriminasi

Maksudnya disini konselor tidak membeda-bedakan dari sudut pandang manapun korban berasal, mialkan suku, budaya dan agama.

2). Hubungan yang setara dan menghormati

3). Menjaga kerahasiaan dan privasi korban

4). Memberi rasa aman dan nyaman terhadap korban

5). Menghargai perebedaan individu

6). Tidak menghakimi menghormati pilihan dan keputusan korban itu sendiri

⁹⁰ Aira, Tim Pendamping P2TP2A Provinsi Lampung, wawancara 20 oktober 2017

7).Peka terhadap latar belakang dan kondisi dan pemakaian bahasa yang sesuai dan dimengerti oleh korban

Seperti yang dikutip dari wawancara pak Yurni :

“Disini kami mempeunyai beberapa prinsip ya yaitu prinsip non deskriminasi, empati, menjaga hubungan, menjaga kerahasiaan dan lain-lain, karena tugas kami disini memberikan insight pada korban, supaya korban dapat mengambil tindakan yang lebih tepat, adapun tehnik-tehnik dari konseling yang pertama attending dimana tehnik ini dipergunakan konselor untuk memusatkan perhatian kepada klien agar klien merasa dihargai dihargai dan terbina suasana yang kondusif sehingga klien bebas mengekspresikan atau mengungkapkan tentang apa saja yang ada dalam pikirannya, perasaan ataupun tingkah laku. Kedua Opening atau pembukaan dimana untuk memulai komunikasi dan hubungan konselin, hal ini dapat berupa menyambut kehadiran klien dan membicarakan topic netral dan sebagainya. Ketiga empati diman merupakan suatu cara untuk menyatakan perasaan konselor terhadap permasalahan klien, konselor seperti merasakan apa yang dirasakan oleh klien.”⁹¹



⁹¹ Yurni, Konselor P2TP2A Provinsi Lampung, wawancara 20 oktober 2017

BAB IV

PENDAMPINGAN PEREMPUAN KEKERASAN FISIK

A. Upaya Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Fisik Di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Lampung

Lembaga Sosial Masyarakat Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Lampung adalah merupakan suatu program atau Organisasi sosial yang mampu memberikan fungsi yang cukup besar terhadap pemberdayaan sumber daya manusia hal ini dapat kita lihat, banyaknya Perempuan dan Anak yang mengalami korban kekerasan fisik, yang seharusnya masyarakat pun ikut andil dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi perempuan dan anak yang mengalami korban kekerasan.

Dari data yang penulis kumpulkan selama penelitian, penulis mengamati betapa besar fungsi Lembaga Sosial Masyarakat Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Lampung terhadap pendampingan perempuan korban kekerasan fisik. Banyak wujud program yang mempunyai tujuan agar perempuan dapat percaya diri dan dapat bertindak sendiri dalam kasusnya, salah satunya adalah kegiatan Pendampingan yang merupakan salah satu kegiatan yang utama. Dalam kegiatan pendampingan ini banyak hal yang diberikan kepada korban kekerasan Fisik dalam memotivasi, menguatkan dan membangkitkan kembali rasa percaya diri korban.

Adapun Upaya yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Lampung yaitu Upaya Pencegahan, meliputi sosialisasi atau memperkenalkan adanya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), bentuk-bentuk kekerasan dan hukuman bagi pelaku. Upaya Penanganan, dilakukan dengan pemberian layanan (pelayanan medis, hukum, dan psikologi) dan memperluas jaringan kerjasama. Upaya Pemulihan, yaitu dengan pemberdayaan perempuan atau pelatihan-pelatihan agar klien atau korban kekerasan dapat mandiri dan dapat lebih percaya diri. Upaya yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Provinsi Lampung sejauh ini sudah berhasil. Upaya Pendampingan menekankan agar masyarakat dapat bekerjasama dalam membantu Perempuan dan Anak korban kekerasan dan tidak menutup sebelah mata, dan yang menjadi tujuan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Lampung yaitu tempat yang memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan serta berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

Dilembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Mempunyai pelayanan yaitu pelayanan medis, pelayanan hukum, pelayanan psikis, dan pelayanan rehabilitasi sosial. Dilihat dari teori Bab

II hal 22 bahwa Pendampingan adalah suatu proses hubungan sosial antara pendamping dengan korban dalam bentuk pemberian kemudahan untuk memecahkan masalah. Orang yang melakukan pendampingan biasanya disebut dengan pendamping. Sedangkan yang memperoleh pendampingan disebut klien. Pendamping dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok masyarakat atau lembaga yang memiliki kemampuan fungsional dan profesional yang diberikan kewenangan untuk melakukan pendampingan.

Bahwa suatu pendampingan membutuhkan waktu yang tidak sedikit, proses mendampingi yang dilakukan oleh Tim Pendamping yang dalam penelitian ini tim pendamping akan membantu korban dalam menyelesaikan kasus yang dialaminya

Dan pada Pendampingan harus didasari dengan teknik-teknik konseling yaitu seperti Teori BAB III teori dari Ibu Aira halaman 59 bahwasanya Konseling harus didasari Teknik-teknik dasar yaitu attending dimana digunakan konselor untuk memusatkan perhatian kepada klien agar klien merasa dihargai dan terbina suasana yang kondusif sehingga klien bisa mengekspresikan atau mengungkapkan tentang apa saja yang ada dalam pikiran, perasaan ataupun tingkah lakunya, sehingga dengan adanya teknik ini klien memulai untuk menjalin hubungan sebagai pertemuan pertama antara korban dengan konselor agar terciptanya kemisteri diantara konselor dengan klien, sehingga pada teknik

selanjutnya korban dapat menceritakan permasalahan yang dialami oleh klien tersebut.

Selain itu dalam proses pendampingan penanganan yang diberikan oleh Lembaga P2TP2A Provinsi Lampung dapat menjadi contoh bagi lembaga lainnya seperti yang dikatakan oleh pak bahri pada Bab III halaman 54 dalam memberikan penanganan korban kekerasan P2TP2A Provinsi Lampung memberikan layanan secepat mungkin tanpa memungut biaya dari pihak korban serta dalam pemberian layanan P2TP2A melakukan kerja sama dengan lembaga tertentu dalam penyediaan pendamping yang diperlukan bagi korban dan melakukan kerja sama dengan lembaga perlindungan.

Keberadaan Lembaga pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak sangat membawa dampak positif bagi masyarakat di sekitar. Hal ini di buktikan dengan adanya Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dapat membantu korban kekerasan atau korban tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan lembaga tersebut dapat membantu masyarakat. seperti pemaparan pada Bab III halaman 56 bahwa kekerasan pada perempuan bukanlah suatu hal yang diinginkan oleh semua orang khususnya perempuan, namun penolakan juga bukanlah hal yang mudah di lakukan, namun dengan adanya lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dapat membantu korban kekerasan khususnya perempuan dalam bertindak.

B. Hasil Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan fisik pada Perempuan di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak

Adapun dengan diadakannya pendampingan perempuan korban kekerasan fisik di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak ini memiliki dampak yang cukup baik bagi korban itu sendiri, dampak yang paling utama adalah meningkatkan kepercayaan diri korban, membangkitkan kembali, dan memotivasi atau mensupport korban agar berani bertindak menyelesaikan masalah yang ia alami.

Hasil bagi Perempuan Korban Kekerasan fisik Sejauh ini hasil dari pendampingan perempuan korban kekerasan sudah berhasil seperti teori dari BAB III hal 59 bahwasanya dengan adanya kegiatan pendampingan perempuan korban kekerasan fisik dapat membantu membangkitkan kepercayaan diri dari korban itu sendiri untuk bertindak lebih tegas dalam permasalahannya tersebut sehingga masalah tersebut dapat terselesaikan. Dalam hal ini juga himbuan untuk masyarakat dapat lebih peduli dengan keadaan korban di masyarakat sekitar sehingga tingkat korban kekerasan terutama di provinsi lampung dapat menurun.

Program yang dilakukan oleh lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak melalui kegiatan pendampingan, ini

tentunya membawa dampak positif bagi perempuan korban kekerasan fisik. Agar proses pendampingan ini berjalan dengan baik dan sesuai seperti pada teori bab II hal 25 tugas dan tanggung jawab pendamping Tugas dan Tanggung Jawab Pendamping .

Dalam melaksanakan tugasnya, pendamping harus berpatokan pada prinsip-prinsip pekerjaan sosial sebagai berikut: Penerimaan, yaitu sebagai pendamping harus bisa menerima korban apa adanya tanpa memandang latar belakangnya. Individualisasi, yaitu harus memahami bahwa korban merupakan pribadi yang tidak sama dengan korban lainnya. Bersikap tidak menghakimi, pendamping harus memahami perilaku-prilaku korban tanpa menghakimi atau melakukan penilaian secara sepihak. Kerahasiaan, yaitu pendamping harus bisa menjaga korban yang bersifat pribadi kepada orang lain. Rasional, yaitu pendamping harus memberikan pertimbangan yang bersifat pribadi kepada orang lain. Empati, yaitu pendamping harus mampu menunjukkan sikap memahami perasaan korban. Kesungguhan dan ketulusan, dalam memberikan pelayanan harus dilandasi sikap yang tulus. Mawas diri, pendamping harus menyadari akan potensi dan keterbatasan dirinya.

Adapun kendala dari pendampingan perempuan korban kekerasan fisik ini menjadi kurang efektif. Seperti teori pada bab III hal 60, pak yurni mengatakan bahwa kendala dalam pendampingan korban yang masih pasif atau tidak mau bicara dan korban yang belum bisa mengekspresikan perasaannya serta

korban sering mengarang cerita atau berbohong, hal demikian membuat tim pendamping kesulitan dalam menangani kasus tersebut maka dari itu Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mengharapkan agar masyarakat sekitar dapat berpartisipasi dalam tindak kasus yang terjadi disekitar kita.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya. Maka bab ini penulis akan menyampaikan hasil penelitian yang penulis laksanakan tentang Pendampingan Perempuan Korban kekerasan Fisik di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Lampung. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari judul penelitian sebagaimana tersebut di atas, ialah sebagai berikut:

Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan sangat lah penting dalam Membantu Korban untuk mengambil tindakan khususnya di Provinsi Lampung. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan anak (P2TP2A) merupakan lembaga yang sangat diperlukan dikarenakan banyak tingkat korban kekerasan fisik maupun psikis pada Perempuan ataupun anak, jadi fungsi dari P2TP2A Provinsi Lampung membangkitkan kembali rasa percaya diri si korban agar mau bertindak dan melaporkan tindak kekerasan tersebut kepada pihak yang berwajib. adapun sistem Pendampingan di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yakni: Pertama sistem Autris atau penjangkauan, kedua sitem terima lempar bola atau yang dimaksud disini lembaga mengetahui terjadinya kekerasan melalui media atau sosial media.

Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai berikut: a). Upaya Pencegahan, meliputi sosialisasi atau memperkenalkan adanya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), bentuk-bentuk Kekerasan dan hukuman bagi pelaku. b). Upaya Penanganan, dilakukan dengan pemberian layanan (pelayanan medis, hukum, psikis dan konseling perkawinan) dan memperluas jaringan kerjasama. c). Upaya Pemulihan, yaitu dengan pemberdayaan perempuan atau pelatihan-pelatihan agar klien atau korban kekerasan dapat mandiri dan dapat lebih percaya diri. Adapun hasil yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Provinsi Lampung dalam menangani kasus Korban kekerasan fisik pada Perempuan dan Anak sejauh ini sudah berhasil dan Upaya yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Lampung menurut pengamatan peneliti sudah semaksimal mungkin dan Proses Pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Lampung bagi perempuan korban kekerasan berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan yaitu sudah sesuai dengan standar Operasional Prosedurnya.

B. Saran

Setelah Paparan Mengenai Kesimpulan Terakhir, mengetahui Proses dan upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam

rangka Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Fisik, adapun saran yang dapat penulis paparkan terkait dengan topik penelitian yaitu:

1. Bagi Lembaga

- a. Diharapkan dalam Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Penambahan Tim Pendamping dan Psikolog di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) agar proses pendampingan lebih maksimal dan Perempuan Korban Kekerasan dapat ditangani semuanya
- b. Peningkatan penyuluhan dan seminar yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kepada masyarakat Khususnya masyarakat Lampung, agar masyarakat tahu akan adanya lembaga Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan perempuan dan Anak yang menangani masalah kekerasan. Kegiatan penyuluhan juga diadakan guna menjaga hubungan kerja sama yang baik antara masyarakat dengan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam proses Pendampingan.
- c. Lembaga (P2TP2A) harus semaksimal mungkin dalam membantu menyelesaikan masalah Kekerasan Terhadap Perempuan maupun Anak dilingkungan sekitar

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah melakukan tindakan secara bijak dalam proses penganggaran, agar upaya lembaga terkait dapat berjalan dengan maksimal sehingga dapat tercipta masyarakat berkeadilan dan sejahtera

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat turut andil; memberikan data dan pengaduan terkait kondisi tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak korban kekerasan sekitar dan dilingkungan.





LAMPIRAN

DAFTAR NAMA SAMPEL

No	Nama	Jabatan	NIP
1	Amir. S.IP	Kepala PTP2A	196807011990031007
2	Yurni M.Psi	Psikolog	197645672006221008
3	RatnaYanuanaSetiawati S.Pd.MM	Tim Pendamping	197201267003122003
4	Ahmad Bakri S.E	Kasi Pelayanan dan Penanganan kekerasan Terhadap Perempuan	196612221991031003
5	Julia Siti Aisyah S.Psi.MM	Psikolog	198207242009022002
6	Aira Damayanti Yuarsa S.H	Tim Pendamping	19682133199830001
7	Tri Apiani S.Pd. MM	Pekerja Sosial	19813212001001007





Gambar 1

Penulis saat melakukan wawancara bersama TIM pendamping dan Pekerja sosial

Gambar 2



Penulis saat Melakukan Wawancara Bersama dengan salah satu TIM Pendamping dari objek penelitian